

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program pertumbuhan pariwisata harus didorong oleh kerangka pembangunan yang mempertimbangkan perubahan kondisi global. Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) ialah kerangka pembangunan yang sejalan dengan dunia yang sedang mendapati perubahan situasi serta lingkungan sampai tahun 2030. Inisiatif *Sustainable Development Goals* (SDGs) ialah janji global untuk meraih kemakmuran, pembangunan, serta kesejahteraan secara efektif. Perekonomian sebuah negara bisa memperoleh keuntungan secara ekonomi dari pengembangan sektor pariwisata yang strategis, yang memiliki akibat pengganda baik secara langsung ataupun tidak langsung. Keuntungan finansial ini seringkali diperoleh dari pendapatan pemerintah, keuntungan mata uang asing, dorongan pembangunan daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang memaksimalkan serta meratakan pendapatan individu, yang semuanya berkontribusi terhadap pembangunan sosio-ekonomi sebuah daerah.

Berpusat pada manusia, transformasional, universal, serta terintegrasi ialah tujuan Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang terdiri atas 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu sektor dengan tingkat pertumbuhan paling cepat di dunia ialah pariwisata, yang juga berpotensi menyajikan kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian seluruh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan

ialah sumber pendapatan asing yang signifikan. Sementara itu, tujuan SDGs nomor 8, 12, dan 14 yang membahas pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta lapangan kerja yang layak, konsumsi dan produksi berkelanjutan (Produksi Konsumsi Berkelanjutan), dan pemanfaatan lautan serta sumber daya kelautan secara berkelanjutan sudah memasukkan pariwisata khususnya sebagai salah satu tujuan utama SDGs. prioritas mereka (*United Nations World Tourism Organizations*, 2021)

Salah satu negara dimana gagasan pariwisata berkelanjutan berkembang pesat ialah Indonesia. Sejalan dengan tujuan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan ialah menciptakan sistem baru dimana masyarakat dan pemerintah bisa menikmati serta memanfaatkan lingkungan tanpa merusaknya. Pemerintah sudah menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu dari tiga bisnis berkembang teratas. Deklarasi Presiden Joko Widodo yang menetapkan pariwisata sebagai “sektor unggulan” pertumbuhan memperkuat komitmen pemerintah untuk mengembangkan industri pariwisata Indonesia. Sektor perekonomian masyarakat sekitar lokasi wisata sangat terdampak dengan kehadiran pengunjung disana. Hal ini memperbaiki posisi negara dalam neraca pembayaran sekaligus memaksimalkan pajak pendapatan nasional dan penerimaan devisa (Yoeti, 2008). Pertumbuhan pariwisata bisa mempengaruhi tidak hanya situasi keuangan negara tetapi juga kemampuan daerah untuk mengurangi pengangguran, memaksimalkan lapangan kerja, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi para pengangguran (Rahma, 2013).

Atraksi bagi wisatawan seringkali dianggap sebagai jawaban atas berbagai permasalahan perekonomian di Indonesia. Karena sektor pariwisata memiliki potensi untuk menyediakan lapangan kerja baru dalam jumlah besar serta peluang ekonomi tambahan, diharapkan permasalahan ekonomi yang disebabkan oleh menurunnya ekspor minyak serta gas, meningkatnya impor, dan pembangunan ekonomi yang tidak merata bisa diatasi. Selain memberikan dorongan kepada pertumbuhan ekonomi lokal, pariwisata membantu melestarikan serta memaksimalkan lingkungan. Indonesia berharap pariwisata bisa membantu pemahaman internasional, neraca pembayaran, dan peningkatan toleransi dan rasa hormat satu sama lain.

Upaya mengembangkan dunia pariwisata ini didukung oleh Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang mengatur bahwasannya keberadaan fasilitas wisata di daerah akan mendatangkan banyak keuntungan, termasuk di antaranya memaksimalkan pendapatan para *startup* di wilayah tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD), menciptakan lebih banyak lapangan kerja, berfokus pada tingginya angka pengangguran serta taraf hidup masyarakat, menumbuhkan rasa cinta yang lebih besar terhadap lingkungan, serta menjaga kelestarian lingkungan serta budaya lokal. Tujuan wisata yang dirancang dengan baik akan memaksimalkan perekonomian lokal dan menyajikan manfaat bagi masyarakat.

Untuk membangun gagasan pembangunan berkelanjutan, standar konsumsi yang beragam yang bisa dicita-citakan setiap orang dalam batas-batas potensi lingkungan harus diciptakan, dengan mempertimbangkan persyaratan yang sesuai secara sosial serta budaya.

Prinsip-prinsip yang bisa kita junjung harus disebarluaskan. Apakah tuntutan ini bisa dipenuhi biasanya bergantung pada apakah diperlukan ekspansi ekonomi ataupun produksi maksimum. Di daerah yang kemajuan ekonominya tidak sejalan dengan keperluan mendasar, pembangunan berkelanjutan ialah syarat penting bagi pertumbuhan ekonomi, asalkan pertumbuhan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip berkelanjutan. Namun, kemiskinan yang meluas bisa disebabkan oleh aktivitas yang terlalu produktif. Oleh karena itu, meraih pembangunan berkelanjutan memerlukan peningkatan kapasitas produktif untuk memenuhi keperluan masyarakat sekaligus menjaga peluang yang adil bagi seluruh orang. Saling ketergantungan manusia serta lingkungan ialah penekanan utama pembangunan berkelanjutan. Alam dipengaruhi oleh manusia baik secara positif ataupun merugikan. Hanya dengan memahami keterkaitan yang rumit antara sistem sosial dan ekologi, hal ini bisa terwujud. Pendekatan yang lebih menyeluruh terhadap pengembangan serta pelaksanaan bisa dicapai dengan memanfaatkan keahlian ini. Hal ini ialah hambatan institusional yang signifikan. Saat ini biasanya ialah penekanan pada masyarakat, bukan masa depan. Perhatian utama dari evaluasi ini ialah akibat pembangunan berkelanjutan. Evaluasi proses diskon dalam konteks pembangunan berkelanjutan harus menyimpang dari anggapan umum. Pandangan terhadap pembangunan berkelanjutan ialah salah satu pandangan jangka panjang. Pemikiran para ppengambil keputusan ekonomi selama ini didominasi oleh kerangka jangka pendek, sehingga harus diperhitungkan.

Jenis pariwisata ini memiliki banyak akar, prinsip panduan, serta pelaku di negara-negara berkembang, namun juga menghadapi hambatan dan kompleksitas karena lemahnya

kapasitas kelembagaan, kurangnya pendanaan, sistem manajemen yang tidak efisien, kurangnya informasi, dan tingginya tingkat pengangguran. dan kemiskinan. Pembentukan, pertumbuhan, keberlanjutan, serta kesetaraan masyarakat adat serta pengunjung diperlukan untuk pariwisata berbasis lingkungan. Perencanaan, pengembangan, operasional, dan strategi pemasaran ekowisata harus mempertimbangkan seluruh landasannya. Konsep ekowisata kurang dipahami, kurangnya pasokan untuk memenuhi permintaan yang luas, serta metode yang dipakai salah, khususnya di negara-negara berkembang. Pariwisata tidak memaksimalkan kesejahteraan masyarakat lokal, tetapi menjadikannya sumber utama ketimpangan ekonomi, konflik sosial, dan ketidakberlanjutan lingkungan (Mosammam, Sarrafi, Nia, & Heidari, 2016).

Regulasi ialah faktor penting dalam pengembangan pariwisata. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Di Daerah Hal ini mengarahkan pertumbuhan ekowisata di daerah tersebut serta memberikan dorongan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan hal yang sama. Ekowisata belakangan ini mulai populer di kalangan wisatawan Indonesia. Secara keseluruhan, undang-undang ini menunjukkan bahwasannya ekowisata masih memiliki potensi untuk tumbuh menjadi salah satu industri lokal terbesar, walaupun belum berkembang secara maksimal baik dari segi sumber daya alam, lingkungan hidup, serta kekhasan alam, alam, dan budaya. Dalam konteks tumbuhnya ekowisata di suatu wilayah, diperlukan inisiatif perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat yang optimal. Prinsip-prinsip kepedulian sosial, ekonomi, serta lingkungan harus

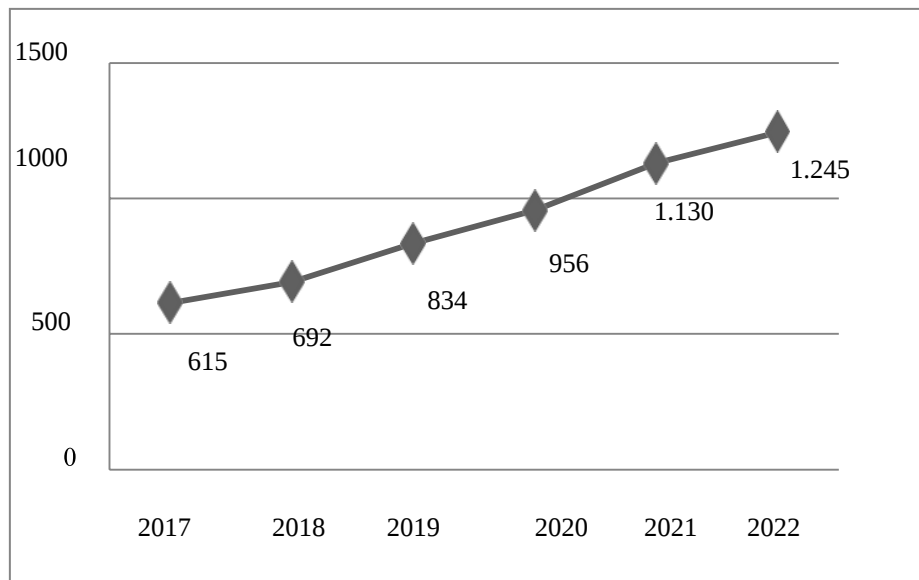
dipertimbangkan, seiring dengan kemungkinan pengelolaan ekowisata yang partisipatif. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 menetapkan bahwasannya prinsip-prinsip ekowisata mencakup pengembangan: kompatibilitas, konservasi, ekonomi, pendidikan, kepuasan dan pengalaman masyarakat, keterlibatan masyarakat dan kearifan lokal.

Memiliki potensi strategis dan menjanjikan bagi pertumbuhan pariwisata serta pembangunan perekonomian bangsa saat ini, memperluas prospek komersial, menghasilkan lebih banyak devisa negara, serta memaksimalkan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Arah dan Rencana Pembangunan Pariwisata Nasional Periode 2010-2025, Pasal 2 (1) menyatakan bahwasannya pembangunan pariwisata nasional mencakup tujuan wisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan organisasi pariwisata. Pada Ayat 6 menyebutkan bahwasannya tujuan pembangunan kepariwisataan nasional adalah: (a) peningkatan kualitas serta kuantitas tujuan wisata; (b) mengkomunikasikan daya tarik wisata di Indonesia dengan memakai media secara efektif, efisien dan bertanggung jawab; c) Melaksanakan sektor pariwisata yang bisa melaksanakan pengelolaan perekonomian nasional dan daerah) Membangun kelembagaan pariwisata serta pengelolaan pariwisata untuk bisa mengembangkan tujuan wisata, pemasaran pariwisata dan pariwisata ke arah profesionalisme, efisiensi serta sinergi.

Salah satu pulau di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk terpadat ialah Pulau Jawa. Enam provinsi yang membentuk pulau Jawa sendiri: Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta (DIY), Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta). Mayoritas penduduk yang tinggal di Pulau Jawa ditemukan di Provinsi DIY dan Jawa Tengah.

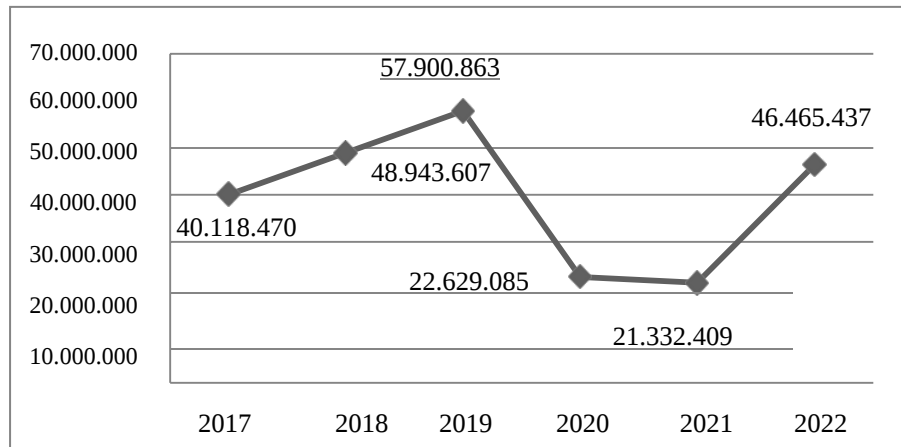
Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi pariwisata terbesar ialah Jawa Tengah, karena kekayaan budayanya yang beragam karena peninggalan sejarah dan budaya masyarakat Jawa yang masih utuh, menjadikan tempat ini sebagai tujuan wisata yang banyak digemari. Dalam mesin pembangunan Jawa Tengah, sektor pariwisata memegang peranan yang krusial. Jawa Tengah berupaya mendongkrak potensi pariwisatanya supaya bisa menarik wisatawan. ditemukan beberapa tempat wisata di Jawa Tengah yang bisa dikunjungi oleh para traveller, dan ini termasuk yang paling terkenal. Secara keseluruhan, Jawa Tengah memiliki beragam wisata, mulai dari wisata alam seperti gunung, kawah, pantai, dataran tinggi, sampai bangunan buatan. Dengan lebih dari 690 tujuan wisata potensial, Provinsi Jawa Tengah (ODWT) menawarkan beragam fasilitas dan atraksi. fakta bahwasannya Indonesia memprioritaskan perjalanan ke Jawa Tengah, pusat kebudayaan nasional dan tempat liburan populer. Provinsi Jawa Tengah memiliki perekonomian pariwisata yang beragam, dengan beragam atraksi alam seperti kawah dan gunung, pantai, dataran tinggi, dan bangunan buatan. Industri pariwisata juga membantu masyarakat tumbuh dengan upaya lain. Misalnya dengan terdapatnya obyek wisata, maka aktivitas perekonomian masyarakat akan tumbuh dengan tersedianya infrastruktur pendukung pariwisata, seperti hotel, penginapan, restoran, bar, kafe, dan jasa penukaran uang.



Grafik 1.1 Daya Tarik Wisata, Minat Khusus, lainnya (Usaha)
Sumber : Buku Statistik Pariwisata Jawa Tengah 2022

Grafik di atas menunjukkan bahwasannya dari tahun ke tahun terjadi pertumbuhan yang nyata pada atraksi wisata, minat khusus, dan usaha lainnya. Nilai tersebut meningkat menjadi 61 pada tahun 2017, 69 pada tahun 2018, 83 pada tahun 2019, dan 95 pada tahun 2020 setelah meningkat secara signifikan menjadi 83 pada tahun 2019. Semakin banyak tujuan wisata, hobi unik, dan faktor (komersial) lainnya akan memberikan dorongan kepada angka tersebut sampai 1,13 pada tahun 2019. 2021 dan 1,24 pada tahun 2022. Grafik yang selalu meningkat menunjukkan bahwasannya wisatawan menginginkan pariwisata dan

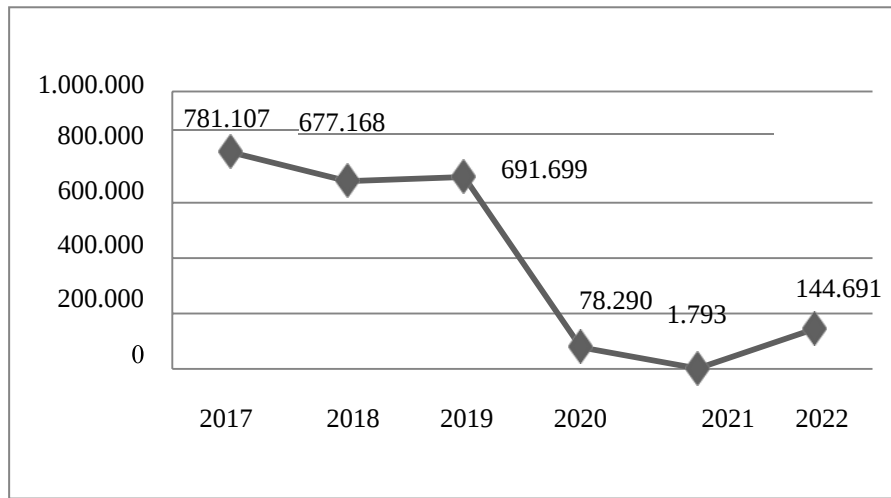
memakai berbagai strategi pemasaran untuk mempromosikannya.



Grafik 1.2 Jumlah Wisata Nusantara (orang)

Sumber : Buku Statistik Pariwisata Jawa Tengah 2022

Berdasarkan grafik di atas, jumlah wisatawan asal Indonesia pada tahun 2017 sebesar 40.118.470 orang, tahun 2018 sebesar 48.943.607 orang, dan tahun 2019 sebesar 57.900.863 orang. Namun pada tahun 2020, jumlah wisatawan asal Indonesia mengalami penurunan yang signifikan sampai meraih 22.629 orang. 085 akibat wabah virus Covid-19 yang melanda seluruh dunia dan mengakibatkan karantina. Pada tahun 2021, jumlah wisatawan domestik kembali turun menjadi 21.332.409 orang karena perpanjangan masa karantina yang menjadikan banyak orang tidak bisa melaksanakan perjalanan jauh ataupun menikmati liburan di tujuan wisata populer, dan kunjungan wisatawan domestik meningkat menjadi 46.465.437 pada tahun 2022. Hal ini ialah kondisi normal baru setelah epidemi global, sehingga aktivitas ekonomi dan kunjungan pengunjung domestik berangsur pulih dibandingkan tahun sebelumnya.



Grafik 1.3 Jumlah Wisatawan Mancanegara (orang)
Sumber : Buku Statistik Pariwisata Jawa Tengah 2022

Berdasarkan grafik jumlah pengunjung asing per orang, pada tahun 2017 sebesar 781.107; pada tahun 2018 sebesar 677.168; pada tahun 2019 meningkat menjadi 691.699; pada tahun 2020 terjadi penurunan tajam sampai meraih 78.290 akibat wabah Covid-19. menyebabkan karantina global, jumlah tersebut juga mendapati penurunan yang sangat disayangkan pada tahun 2021, meraih 1.793, karena waktu karantina diperpanjang sehingga mencegah pengunjung internasional untuk mengunjungi negara lain. Seiring waktu, jumlahnya akan meningkat lagi menjadi 144.691 pada tahun 2022.

Grafik di atas menunjukkan bahwasannya daya tarik wisata, minat unik, dan lainnya di Provinsi Jawa Tengah mendapati peningkatan setiap tahunnya baik dalam jumlah pengunjung lokal ataupun mancanegara. Namun karena pandemi global yang kini terjadi, pariwisata domestik mendapati penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2021. Jika ditangani dengan baik dan efisien, potensi Jawa Tengah pascapandemi akan terbukti bermanfaat tidak hanya bagi pemerintah daerah tetapi juga bagi dunia usaha, komunitas dan masyarakat pada

umumnya. Permasalahan berikut ini kini menghantui industri pariwisata di Jawa Tengah: (1) belum memadainya penerapan dan promosi informasi yang komprehensif dan terpadu; (2) kurangnya kolaborasi kelembagaan antara daerah, pemerintah, dan pemangku kepentingan pariwisata; dan (3) kualitas produk di bawah standar. Pemasaran masih dipandang sebagai alat promosi, maka upaya pemasaran yang dilaksanakan pemerintah belum membuahkan hasil.

Tabel 1. 1 Capaian Kinerja Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja Program					Capaian Kinerja Program				% (2021 THDP 2020)*	% (2021 THDP Target)*
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021		
Jumlah Kunjungan Wisnus (orang)	34.825.055	46.645.745	14.973.707	18.717.134	11.529.754	49.943.607	57.900.863	22.629.085	21.2332.409	Turun 5,7%	+12%
Jumlah Kunjungan Wisman (orang)	435.000	857.710	57.394	71.743	675	677.168	691.699	78.290	1.793	Turun 97%	-97%

Sumber : Buku Saku Profil Pariwisata & Ekonomi Kreatif Jawa Tengah 2022

Tabel 1.1 Statistik Capaian Kinerja Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 menunjukkan bahwasannya jumlah pengunjung domestik dan mancanegara pada tahun 2021 tidak mendapati perubahan dibandingkan tahun 2020. Namun jika dilihat dari statistik persentase (%) tahun 2021, sasarannya ialah pengunjung lokal. akan meningkat sekitar 12%, sementara wisatawan internasional diperkirakan akan meraih 97% dari target tersebut. Alasannya, pada tahun 2020, sebelum pandemi, kita masih menerima bantuan pada kuartal

pertama. Setelah itu, terjadi penurunan pergerakan penduduk dan PPKM masuk dalam kategori Darurat Level 4, sementara seluruh pesawat asing tetap dikandangkan. Dalam beberapa tahun sebelumnya, terjadi penurunan jumlah wisatawan baik lokal ataupun mancanegara sehingga sulit meraih tujuan tersebut. Karena keberhasilan ini dicapai di wilayah Jawa Tengah, diperlukan pendekatan baru untuk menarik lebih banyak wisatawan.

Setiap wilayah di Jawa Tengah memiliki daya tarik tersendiri, namun Kabupaten Wonogiri berhasil menjaga keindahan alamnya sampai menarik wisatawan. Kawasan ini dijuluki “Kota Gaplek” karena kekayaan warisan budayanya, keragaman budayanya, dan kuliner masyarakatnya. Distrik ini menawarkan beragam makanan tradisional, karya seni, dan makanan khas masyarakat lainnya, dan berhasil tetap lestari walaupun daerah sekitarnya mendapati perkembangan pesat. Tujuan wisata di Kabupaten Wonogiri ini belum banyak mendapat perhatian masyarakat luas karena letaknya yang terpencil dari pusat provinsi Jawa Tengah dan minimnya informasi mengenainya.

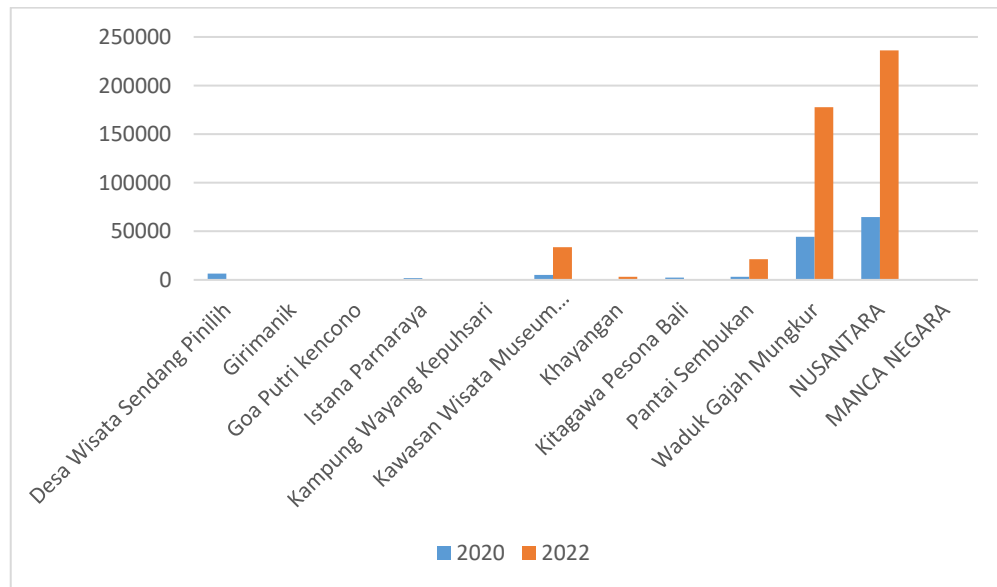
Waduk Gajah Mungkur Wonogiri memiliki banyak potensi untuk menjadi obyek wisata populer. Waduk ini mungkin bisa menjadi pilihan tepat untuk berlibur dan menikmati suasana alam yang tenteram dan tenteram karena keindahan alamnya yang menawan serta beragam aktivitas wisata yang ditawarkannya. Kabupaten Wonogiri memiliki aset besar di Waduk Gajah Mungkur. Waduk ini berfungsi sebagai mekanisme pencegahan banjir, sistem irigasi, dan sumber energi. Ini juga ialah obyek wisata yang populer. Untuk memanfaatkan sepenuhnya potensi wisata Waduk Gajah Mungkur, masih banyak yang harus dilaksanakan untuk mempromosikan dan mengembangkan industri pariwisata waduk tersebut.

Masuk akal jika pemerintah daerah berkonsentrasi pada atraksi wisata unggulan industri ini, mengingat kekayaan dan potensi Kabupaten Wonogiri. Terletak tujuh (7) kilometer sebelah selatan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, Obyek Wisata Alam Waduk Gajah Mungkur ialah salah satu tempat wisata yang ditemukan di Kabupaten Wonogiri. Sungai Bengawan Solo yang ialah sungai terpanjang di Pulau Jawa dibendung untuk menjadikan waduk ini. Mencakup 51 desa di 7 kecamatan, luas wilayah terendam sekitar 8.800 hektare, sedangkan wilayah terbebaskan seluas 90 km². Sejumlah 51 komunitas tersebut ialah bagian dari peristiwa transmigrasi 'desa bedol' yang terjadi pada tahun 1976 ke Pulau Sumatera. Pembangunan Waduk Gajah Mungkur dilaksanakan secara mandiri dengan bantuan tenaga ahli Nippon Koei Co., Ltd. Jepang.

Pembangunan Waduk Gajah Mungkur memiliki beberapa keunggulan antara lain pengelolaan banjir di Sungai Bengawan Solo, penyediaan air irigasi untuk kawasan eks Karisidenan Surakarta, penyediaan listrik untuk wilayah Kabupaten Wonogiri, dan pengembangan air tawar, perikanan, khususnya produksi keramba jaring apung, indigo dan tempat wisata yang menyediakan berbagai pilihan rekreasi. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wonogiri Pasal 10 Pasal 7 A menyebutkan “*KSPK Wilayah/Zona Bendungan Serba Guna Wonogiri (Waduk Gajah Mungkur Wonogiri) Wonogiri dan sekitarnya*”.

Waduk Gajah Mungkur yang ialah bagian dari KSPK (Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten) memiliki potensi untuk semakin populer dan menarik lebih banyak pengunjung

dengan mengimplementasikan metode pemasaran dan promosi yang efektif. Hal ini akan memaksimalkan pendapatan daerah dan menyajikan akibat positif bagi perekonomian masyarakat setempat. Lewat penciptaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengembangan Waduk Gajah Mungkur sebagai tujuan wisata sudah memaksimalkan pendapatan asli daerah Kabupaten Wonogiri secara signifikan. Selain hal tersebut, kawasan Waduk Gajah Mungkur sudah menjadi tujuan wisata populer dan menyediakan lapangan kerja bagi banyak penduduk setempat. Di sekitar lokasi wisata dibangun berbagai usaha, antara lain restoran, hotel, homestay, toko cinderamata, dan pasar, yang semuanya menunjang perekonomian masyarakat setempat.



Grafik 1. 4 Daya Tarik Wisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 dan Tahun 2022

Sumber : Buku Saku Profil Pariwisata & Ekonomi Kreatif Jawa Tengah 2022

Cara penanganan temuan data membuatnya terlihat lebih komprehensif. Dari data grafik yang diberikan, bisa disimpulkan bahwasannya sudah terjadi perubahan di sejumlah tempat wisata terkait antara tahun 2020 dan 2022. Pada tahun 2020, ditemukan 64.602

wisatawan nusantara; pada tahun 2022 berjumlah 23.6052. Berdasarkan statistik, bisa disimpulkan bahwasannya terjadi penurunan sepanjang era tersebut, yang mungkin disebabkan oleh pergeseran preferensi pengunjung ataupun sebab lainnya. Mengingat keadaan yang ada, sejumlah opsi tersedia untuk penyelesaian. Penyebab analisis perubahan, pengembangan strategi pemasaran, diversifikasi produk, kolaborasi dan kemitraan, memaksimalkan pengalaman pengunjung, pemantauan dan penilaian berkelanjutan, dan memaksimalkan kesadaran pengunjung.

Tabel 1. 2 Daya Tarik Wisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 dan Tahun 2022

Destinasi	Tahun	
	2020	2022
Desa Wisata Sendang Pinilih	6.400	0
Girimanik	831	0
Goa Putri Kencono	87	348
Istana Parnaraya	1.934	0
Kampung Wayang Kepuhsari	259	0
Kawasan Wisata Museum Karst	4.892	33.562
Khayangan	517	3,239
Kitagawa Pesona Bali	2227	0
Pantai Sembukan	3126	21.164
Waduk Gajah Mungkur	44.339	177.739
Nusantara	64.702	236.052
Mancanegara	0	0

Sumber : Buku Saku Profil Pariwisata & Ekonomi Kreatif Jawa Tengah 2022

Desa wisata Sendang Pinilih, Girimanik, Istana Parnaraya, Desa Wayang Kepuhsari, dan Kitagawa Pesona Bali mendapati penurunan antara tahun 2020 sampai 2022 berdasarkan statistik pada tabel di atas. Sementara itu, data tabel menunjukkan terdapatnya

pertumbuhan signifikan dalam jumlah pengunjung ke Goa Putri Kencono, Kawasan Wisata Museum Karst, Khayangan, Pantai Sembuka, dan Waduk Gajah Mungkur—yang banyak di antaranya juga ialah tempat wisata unggulan di Kabupaten Wonogiri. Waduk Gajah Mungkur sendiri diperkirakan cakap menarik 44.339 pengunjung pada tahun 2020 dan 177.739 pengunjung pada tahun 2022. Waduk Gajah Mungkur menjadi daya tarik utama karena memiliki makna sejarah, daya tarik wisata alam, dan nilai edukasi sebagai simbol Kabupaten Wonogiri.

Data banyaknya pengunjung tujuan wisata Waduk Gajah Mungkur menunjukkan bahwasannya wisata buatan di Waduk Gajah Mungkur semakin dikenal di Kabupaten Wonogiri. Setelah beberapa tahun mendapati penurunan akibat wabah Covid-19, diperlukan revisi rencana untuk memaksimalkan minat masyarakat terhadap tujuan wisata tersebut, berdasarkan perkembangan data tersebut. Waduk Gajah Mungkur memiliki banyak potensi wisata, namun masih ditemukan beberapa kendala dalam taktik pemasaran dan promosi. Misalnya, promosi media sosial dan surat kabar yang kurang agresif. Dengan demikian, tujuan wisata Waduk Gajah Mungkur bisa kita aktifkan dan butuh bersinergi. Adapun beberapa strategi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wonogiri sesuai dengan Pasal 33 Ayat A yakni memaksimalkan pemasaran dan promosi untuk memberikan dukungan kepada penciptaan tujuan pariwisata yang diprioritaskan. Untuk menjangkau segmen pasar wisata khusus dan memenuhi tujuan kebijakan pengembangan wisata Waduk

Gajah Mungkur, pemasaran dan promosi memainkan peran penting dalam penyebaran informasi.

Kebijakan pemasaran dan promosi pengembangan pariwisata di Obyek Wisata Waduk Gajah Mungkur bertujuan untuk menginformasikan wahana rekreasi, fasilitas umum, promo yang ditawarkan, dan menarik daya tarik wisatawan. Upaya langkah dari strategi ini dengan kebijakan segala bentuk penjualan, dari promosi penjualan tiket, penjualan langsung dengan UMKM setempat, publikasi wisata Waduk Gajah Mungkur, pengemasan produk hasil olahan, acara yang di adakan dan pemasukan dari sponsorship, periklanan dan layanan fasilitas yang di dapatkan. Keberhasilan kebijakan pemasaran dan promosi itu baik ataupun tidak, promosi yang baik itu bisa menarik minat berkunjung dari wisatawan lokal ataupun mancanegara untuk berkunjung ke Waduk Gajah Mungkur dan tepat sasaran. Melihat fenomena tersebut peneliti tertarik untuk melakukan evaluasi dari kebijakan pemasaran dan promosi yang sudah ditemukan dengan kesesuaian di lapangan.

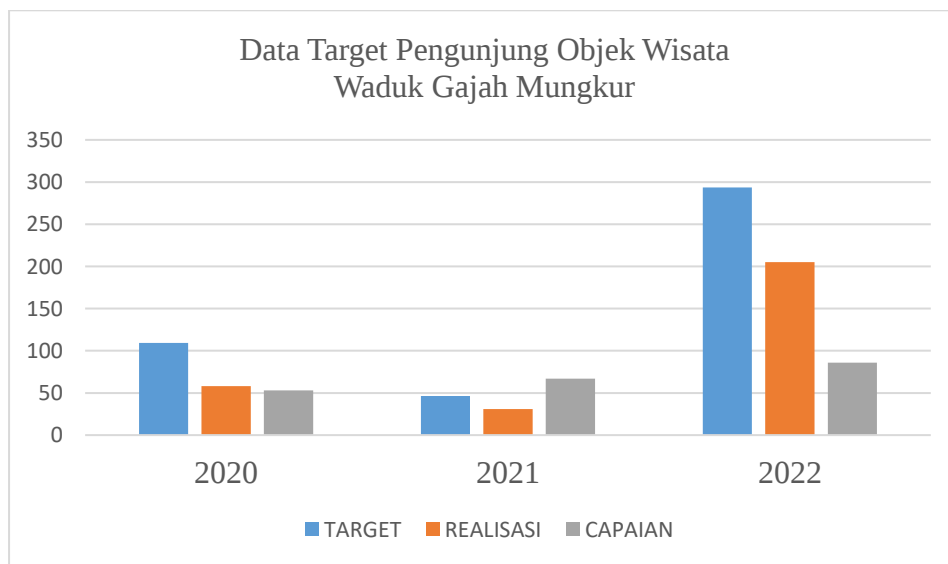
Tabel 1. 3 Data Capaian Target Pengunjung Obyek Wisata Waduk Gajah Mungkur

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Pendapatan Daerah
2020	109.182	57.985	0.53	Rp 5,600,000,000
2021	46.304	30.897	0.67	Rp 909,863,800
2022	293.728	205.191	0.86	Rp 230,467,350

Sumber : Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri

Berdasarkan data tabel di atas pada tahun 2020 target pengunjung di Obyek Wisata Waduk Gajah Mungkur yaitu 109.182 wisatawan, akan tetapi realisasinya hanya 57.985 wisatawan, adapun capaiannya dalam persen 0,53 %. Kemudian pada tahun 2021 target

pengunjung yaitu 46.304 wisatawan dengan realisasinya 30.897 wisatawan, adapun capaian dalam persen 0,67%. Sedangkan pada tahun 2022 target pengunjung yaitu 293.728 wisatawan dengan realisasinya 20.191 wisatawan, adapun capaian dalam persen 0,86%. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun pada tahun 2020 sampai tahun 2022 ternyata tidak memenuhi capaian target pendapatan daerah.



Grafik 1. 5 Data Capaian Target Pengunjung Obyek Wisata Waduk Gajah Mungkur
Sumber : Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri

Berdasarkan data grafik di atas capaian target pengunjung di Waduk Gajah Mungkur sudah cukup banyak akan tetapi harus ditingkatkan karena termasuk obyek wisata Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahunan Kabupaten Wonogiri sehingga butuh terdapatnya tinjauan ulang terkait kebijakan pemasaran dan promosi apakah sudah berjalan sesuai dengan kebijakan yang sudah ada. Sementara di obyek wisata Waduh Gajah Mungkur

sudah melaksanakan beberapa inovasi baru supaya menarik pengunjung dengan menambah fasilitas yang sedang tren, akan tetapi banyak masyarakat Wonogiri dan masyarakat luas tidak mengetahui inovasi tersebut, maka dari kebijakan ini peneliti akan mencoba menganalisis, mengevaluasi, dan menyajikan rekomendasi terkait kebijakan pemasaran dan promosi pengembangan pariwisata.

Penelitian berikut penting dilaksanakan karena untuk mengetahui keberhasilan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam mengembangkan Obyek Wisata Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri. Dengan terdapatnya penelitian berikut diharapkan nantinya keberhasilan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri bisa menjalankan strategi pemasaran dan promosi kebijakan pengembangan khususnya pada sektor pariwisata dengan efektif, sehingga sektor pariwisata di Kabupaten Wonogiri menjadi sektor unggulan yang cakap menyajikan akibat kepada masyarakat ataupun daerah sesuai dengan target capaian kinerja yang sudah ditetapkan oleh Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini tentang jumlah pengunjung wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara.

Berdasarkan latar belakang di atas maka pertanyaan penelitian yang akan di jawab adalah mengapa kebijakan pemasaran dan promosi pengembangan pariwisata Obyek Wisata Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri belum mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

1.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Peneliti sudah mengidentifikasi beberapa permasalahan tentang kebijakan pemasaran dan promosi pada pengembangan pariwisata Obyek Wisata Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri, dan peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut lebih lanjut. Adapun permasalahannya adalah:

1. Masih rendahnya angka kunjungan wisatawan di Obyek Wisata Waduk Gajah Mungkur Kabupaten Wonogiri.
2. Belum meningkatnya pendapatan dari sektor pariwisata khususnya Obyek Wisata Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a) Bagaimana kebijakan pemasaran dan promosi pada pengembangan wisata di Obyek Wisata Waduk Gajah Mungkur Kabupaten Wonogiri selama ini dilaksanakan?
- b) Apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pemasaran dan promosi pengembangan wisata di Obyek Wisata Waduk Gajah Mungkur Kabupaten Wonogiri?

1.3 Tujuan Penelitian

Peneliti bisa mencantumkan tujuan utama penelitian ini sebagai berikut, dengan mempertimbangkan latar belakang dan rumusan masalah yang disebutkan di atas:

- a) Mengevaluasi kebijakan pemasaran dan promosi pada kebijakan pengembangan pariwisata di Obyek Wisata Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri.
- b) Menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pemasaran dan promosi pengembangan Obyek Wisata Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri.

1.4 Manfaat Penelitian

Tergantung pada tujuan yang ingin dicapai perusahaan atau institusi, penelitian berikut ditujukan untuk membantu mereka secara langsung ataupun tidak langsung. Manfaat dari penelitian berikut ialah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian berikut ditujukan untuk memperluas wawasan dan mengoptimalkan pemahaman di bidang administrasi publik, khususnya mengacu pada taktik yang dilakukan Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri dalam pertumbuhan pariwisata, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. memberikan dukungan kepada sekaligus menghambatnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Peneliti

Ada harapan besar bahwasannya temuan penelitian berikut akan memungkinkan para sarjana untuk lebih memahami ilmu administrasi publik, khususnya kebijakan publik dan manajemen publik. Secara umum, penelitian ini ialah upaya untuk memikirkan dan mempraktikkan

pemecahan masalah untuk meraih solusi, dan juga upaya untuk menganalisis masalah dan fenomena. Evaluasi Kebijakan Publik: menyajikan pelayanan yang sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya kepada masyarakat secara keseluruhan, Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri pada khususnya.

1.4.2.2 Bagi Lembaga Pendidikan / Universitas

Kesimpulan penelitian berikut ditujukan untuk memajukan pemahaman dan berfungsi sebagai panduan untuk penyelidikan di masa depan tentang evaluasi kebijakan pengembangan wisata.

1.4.2.3 Bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

Temuan penelitian berikut ditujukan untuk membantu Dinas dalam menentukan seberapa baik metode kebijakan pengembangan yang diterapkan di Obyek Wisata Waduk Gajah Mungkur Kabupaten Wonogiri.

1.4.2.4 Bagi Pihak Lain / Pembaca

Selain melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan di Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata serta mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat dalam proses kebijakan di obyek wisata, dilaksanakan beserta solusinya dan bisa dijadikan acuan untuk kasus serupa yang melibatkan kebijakan pengembangan pariwisata, diharapkan penelitian berikut bisa menyajikan pengetahuan, informasi, dan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 4
Penelitian Terdahulu

No	Jurnal	Nama Penyusun, Tahun, dan Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian dan Teori	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1.	Jurnal Pekerjaan Sosial. Vol 1 No. 3	Binahayati Rusyidi, Muhammad Fedryansah (2018). Pengembangan Pariwisata Berdasarkan Masyarakat	Menciptakan paradigma pertumbuhan pariwisata berbasis komunitas di Kabupaten Bangka dengan fokus pada kawasan Pantai Rebo dan Pantai Rambak.	Metode Penelitian memakai Pendekatan Deskriptif Kualitatif. Teori Pengembangan Pariwisata dari Page (2009) : <i>Boostern approach, The economic industry approach, The physical spatial approach, The community approach, dan Sustainable approach</i>	Model alternatif yang bisa diterapkan dalam pengembangan pariwisata di wilayah Kabupaten Bangka.	Ada kesamaan antara penelitian berikut dan penelitian masa depan tentang pengembangan pariwisata, akan tetapi dengan obyek fokus dan lokasi yang tidak sama yakni Evaluasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata pada Obyek Wisata

						Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri
2.	<i>Journal of Public Policy and Management Review</i> , Vol. 10, No. 1	Odiakta Iqtyar, R. Slamet Santoso (2016). Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Tentang Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang	Menjelaskan dan mengkaji perlunya Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang.	Penelitian berikut menggunakan metodologi kualitatif dan memiliki sifat deskriptif. Teori Evaluasi Kebijakan dari William Dunn (2000) : Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketetapan	Berdasarkan indikator penilaian yang disampaikan oleh William Dunn, bisa disimpulkan bahwasannya BP2KS masih belum cakap dalam hal efikasi dalam menjalankan kewajibannya.	Terdapat kesamaan antara penelitian berikut dan penelitian Evaluasi Kebijakan yang akan datang, akan tetapi dengan obyek fokus dan lokasi yang tidak sama yakni Evaluasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata pada Obyek Wisata Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri

3.	Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminstrasi dan Pelayanan Publik, Vol 8, No.1	Kariamman Sinaga; M. Amri Nasution; Ayu Trisna Dewi (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Menganalisis tentang bagaimana implementasi pengembangan pariwisata di Kecamatan Pantai Cermin	Metode Penelitian berikut Metode penelitian berikut ialah deskriptif kualitatif. Teori Konsep Good Governance dari Rusyidi (2019) : menyajikan peluang untuk memaksimalkan pemberdayaan masyarakat seiring dengan peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan lapangan kerja dan pendapatan daerah di daerah tersebut.	Solusi yang ditawarkan dengan terdapatnya perbedaan kondisi social untuk dikembangkan sejalan dengan pariwisata di tingkat kecamatan khususnya di Kecamatan Pantai Cermin	Penelitian berikut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan terkait Pengembangan Pariwisata, akan tetapi dengan obyek fokus dan lokasi yang tidak sama yakni Evaluasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata pada Obyek Wisata Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri
4.	<i>Journal of Social and Political</i>	Lia Apriliani (2022) Evaluasi Pelaksanaan	Identifikasi permasalahannya ialah kurangnya	Metodologi studi kasus digunakan bersama dengan	Hasil penelitian bisa disimpulkan bahwasannya	Penelitian berikut memiliki kesamaan dengan

	<i>Sciences</i> , Vol 3, No. 2	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pandeglang Tahun 2015-2025 (Studi Kasus Pada Objek Wisata Air Panas Cisolong, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang)	infrastruktur fasilitas umum pariwisata, lemahnya pemberdayaan masyarakat pariwisata di tempat wisata Cisolong sebagai pelaku wisata dan kurang optimalnya promosi pariwisata yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang.	penelitian deskriptif kualitatif sebagai desain penelitian. Teori Evaluasi Kebijakan Publik dari Jones : Spesifikasi Objek, Teknik Pengukuran, Metode Analisis, dan Rekomendasi dan Hasil	Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pandeglang Tahun 2015-2025 (Studi Kasus Pada Objek Wisata Air Panas Cisolong, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang) masih belum optimal karena dalam pelaksanaan peraturan daerah masih memiliki kekurangan pada sumber daya aparatur	penelitian yang akan dilaksanakan terkait Evaluasi Kebijakan, akan tetapi dengan obyek fokus dan lokasi yang tidak sama yakni Evaluasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata pada Obyek Wisata Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri
5.	Jurnal Ilmiah Administrasi	Galuh Rimadevi, Lely Indah Mindarti, Imam	Menyadari inisiatif yang ada, implementasinya,	Metode deskriptif kualitatif digunakan	Program dan strategi pengelolaan wisata kawasan pesisir,	Terdapat kesamaan antara penelitian berikut

	Publik (JIAP), Vol 8, No. 2	Hanafi (2022). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Pembangunan Berkelanjutan di Pantai Ngliyep Kabupaten Malang (Studi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang)	dan kesesuaiannya dengan desa pesisir di Kabupaten Malang khususnya Pantai Ngliyep ialah hal yang penting	dalam penelitian berikut. Menurut William Dunn (1999), teori evaluasi adalah: Efficacy, Efficiency, Sufficiency, Fairness, Reactivity, dan Willingness	menurut penelitian, sangat penting untuk memaksimalkan perekonomian lokal di desa-desa sekitar pantai Ngliyep, khususnya Desa Kedungsalam.	dan penelitian Evaluasi Kebijakan yang akan datang, akan tetapi dengan obyek fokus dan lokasi yang tidak sama yakni Evaluasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata pada Obyek Wisata Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri
6.	<i>Journal of Governance and Public Policy</i> , Vol 4, No. 3	Amin Sapto Saputro, Ane Permatasari, Dwian Hartomi Akta Padma Eldo (2017). Evaluasi Pengembangan Objek Wisata Di	Menganalisis akibat daya tarik wisata yang ditemukan di Kabupaten Banyumas khususnya wisata Baturraden	Penelitian berikut menggunakan pendekatan kualitatif dan memiliki sifat deskriptif. Konsep Dasar Pariwisata menurut Gamal Suwanto (2004):	Ketika pekerja lapangan tidak dilibatkan dalam proses pengembangan atraksi wisata, hasil yang dirasakan tidak akan selaras dengan	Ada kesamaan antara penelitian berikut dan penelitian masa depan tentang pengembangan pariwisata, akan tetapi dengan

		Kabupaten Banyumas Dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014	terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banyumas, serta hubungan jumlah wisatawan dengan retribusi objek wisata Baturraden	Pariwisata sangat erat kaitannya dengan pengertian perjalanan wisata, yang diartikan sebagai peralihan dari usaha mencari penghidupan di lokasi yang dikunjungi menjadi berwisata hanya untuk tujuan bersenang-senang dan berprestasi. berbagai aspirasi.	keinginan penyedia masukan	obyek fokus dan lokasi yang tidak sama yakni Evaluasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata pada Obyek Wisata Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri
7.	Jurnal Manajemen dan Bisnis Baja, Vol 1 No. 2	Rohaelis Nurasyiah, Sev.Rahmiati (2019). Evaluasi Kinerja Kebijakan Sektor Pariwisata dalam memberikan dukungan kepada Kota Serang sebagai Kota Kreatif	Menetapkan langkah-langkah untuk memaksimalkan kontribusi industri pariwisata terhadap status Kota Serang sebagai Kota Kreatif, sebagaimana tertuang dalam	Menggunakan teknik analisis data Mixed Methods ataupun Metode Kombinasi (kuantitatif dan kualitatif). Teori Evaluasi Kebijakan dari William Dunn (2000) : Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan,	Hasil dari pasangan ini mengarah pada permasalahan kebijakan yang diperhitungkan ketika meninjau kebijakan pariwisata, sehingga menghasilkan terciptanya kebijakan baru yang menjunjung tinggi Kebijakan tersebut.	Terdapat kesamaan antara penelitian berikut dan penelitian Evaluasi Kebijakan yang akan datang, akan tetapi dengan obyek fokus dan lokasi yang tidak sama yakni Evaluasi

			RPJMD Kota Serang dan pengajuan proposal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada UNESCO	Responsivitas, dan Ketetapan	Kota Kreatif Kota Serang	Kebijakan Pengembangan Pariwisata pada Obyek Wisata Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri
8.	Jurnal Pemikiran Administrasi Negara, Vol 13 No. 1	Yusuf Hariyoko, Adi Soesiantoro, Revi Pravira Pangestuti (2021). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Wisata Religi di Kabupaten Gresik	Beberapa teori Stufflebeam—evaluasi konteks, masukan, proses, dan produk—diterapkan untuk melakukan evaluasi ataupun menganalisis efektivitas kebijakan pengembangan wisata religi ini.	Metode penelitian memakai pendekatan kualitatif. Teori Evaluasi Kebijakan Publik (Model Cipp) dari Daniel Stufflebeam: 1) <i>Context Evaluation</i> (evaluasi konteks) 2) <i>Input Evaluation</i> (evaluasi masukan) 3) <i>Process Evaluation</i> (evaluasi proses) 4) <i>Product Evaluation</i> (evaluasi hasil)	Peneliti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik menyarankan agar promosi Situs Giri Kedaton sebagai objek wisata populer di Kabupaten Gresik harus menjadi fokus utama upaya.	Terdapat kesamaan antara penelitian berikut dan penelitian Evaluasi Kebijakan yang akan datang, akan tetapi dengan obyek fokus dan lokasi yang tidak sama yakni Evaluasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata pada Obyek Wisata Waduk Gajah

						Mungkur di Kabupaten Wonogiri
9.	Jurnal Eksekutif, Vol 1 No. 1	Regina Sari Bagit, Sarah Sambiran, Josef Kairupan (2017). Evaluasi Program Kerja Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Pasir Putih Maelang (Suatu Studi Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Di Kabupaten Bolaang Mongondow)	Mengidentifikasi dan menganalisis Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow 2012-2017	Metode yang dipakai dengan pendekatan kualitatif dimana penelitian yang dilaksanakan memiliki sifat deskriptif. Teori evaluasi dari Subarsono (2006) : Efektivitas, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketetapan.	Program yang dikembangkan tidak berjalan, infrastruktur tidak cukup memberikan dukungan kepada, dan program belum dilaksanakan. Pemeliharaan dan pelestarian fasilitas program secara maksimal dan memadai	Terdapat kesamaan antara penelitian berikut dan penelitian Evaluasi Kebijakan yang akan datang, akan tetapi dengan obyek fokus dan lokasi yang tidak sama yakni Evaluasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata pada Obyek Wisata Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri

10.	Jurnal Sebatik, Vol 24, No. 2	Wazni, Zulfa Harirah MS, dan Ramlan Darmansyah (2020). Evaluasi Input Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Siak	Mengevaluasi input kebijakan pariwisata di Kabupaten Siak yang mengusung pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal	Penelitian berikut ialah penelitian kualitatif yang lebih mengutamakan pemakaian logika induktif. Teori Evaluasi Kebijakan Publik dari Stufflebeam : model CIPP yang ialah singkatan dari <i>context evaluation, input evaluation, process evaluation, and product evaluation</i> . Model CIPP ini merupakan pendekatan evaluasi yang berorientasi pada pengambilan keputusan	Permasalahan lain yang mempengaruhi pertumbuhan wisatawan Kabupaten Siak ialah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi belum dimanfaatkan secara maksimal untuk memasarkan dan mempromosikan pariwisata	Penelitian berikut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan terkait Evaluasi Kebijakan, akan tetapi dengan obyek fokus dan lokasi yang tidak sama yakni Evaluasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata pada Obyek Wisata Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri
11.	Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Vol 47, No. 1	Vivi Alvionita, Ari Darmastuti, Robi Cahyadi K dan Syarif	Melihat bagaimana evaluasi program pengembangan	Penelitian berikut menggunakan strategi kombinasi, dengan menggunakan teknik	Kemajuan Inisiatif ini berpotensi memaksimalkan pariwisata, PDB,	Penelitian berikut memiliki kesamaan dengan penelitian yang

		Makhya (2021). Evaluasi Kebijakan Publik Tentang Program Pengembangan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur (Studi Pada Program Kalender Event Dan Festival Di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018)	pariwisata Kabupaten Lampung Timur dengan melaksanakan evaluasi terhadap program yang ditinjau dari 4 aspek yakni masukan, proses, manfaat dan akibat	wawancara sebagai metode utama dan pendekatan deskriptif kuantitatif sebagai metode sekunder. Penelitian berikut menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III dan teori analisis SWOT dari Fred R. David	jumlah atraksi wisata, prospek komersial, dan secara bertahap memperbaiki reputasi negatif negara tersebut. Kabupaten Lampung Timur, sarana memotivasi masyarakat untuk memaksimalkan keamanan daerah dan mengajarkan masyarakat bahasa lain	akan dilaksanakan terkait Evaluasi Kebijakan, akan tetapi dengan obyek fokus dan lokasi yang tidak sama yakni Evaluasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata pada Obyek Wisata Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri
12.	Jurnal Pembangunan dan Inovasi Karta Rahardja, Vol 1. No. 1	Dyah Eka Supiana (2019). Pengembangan Wisata Wendit sebagai Penunjang Pariwisata di Kecamatan Pakis	mengidentifikasi potensi investasi di Kawasan Wisata Wendit, mengidentifikasi potensi investasi dan kegiatan pengembangan produk wisata,	Metodologi penelitian menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai bagian dari pendekatan deskriptif kualitatif. Teori Pengembangan Pariwisata McCool	Diversifikasi melalui pengelolaan kolaboratif ialah model pengelolaan yang cocok. Kesimpulannya, pengelola partai memiliki sejumlah tanggung jawab,	Penelitian berikut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan terkait Pengembangan Pariwisata, akan tetapi dengan

		Kabupaten Malang	serta strategi investasi berdasarkan analisis studi kelayakan Investasi	dan Moisey (2008) dan Teori Analisis Data Miles & Huberman (2009): Biasanya, promosi wisatawan terbatas pada menyoroti destinasi; itu tidak melibatkan pemasaran pariwisata itu sendiri. Dalam hal ini, hal ini mencakup komponen penciptaan dan perlindungan produk.	seperti membuat paket dan menjaga lingkungan. Perjalanan interpretatif/edukasi	obyek fokus dan lokasi yang tidak sama yakni Evaluasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata pada Obyek Wisata Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri
13.	Jurnal Kajian Sosial Keagamaan, Vol 4, No.2	Afrizza Wahyu, Endang Larasati, Tri Yuniningsih (2021). Pengembangan Pariwisata Dalam Menyongsong New Normal	Mengetahui kebijakan yang diambil guna membangun kembali sektor pariwisata dalam menyongsong era <i>new normal</i> .	Metode yang dipakai dalam penulisan ini adalah kepustakaan deskriptif. Teori Aspek Pembangunan dari Kuncoro: <i>Sustenance</i> , <i>Self Esteem</i> dan <i>Freedom from servitude</i> .	Kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memajukan pariwisata dalam kota, ataupun perjalanan dalam kota, dalam pengembangan industri pariwisata	Penelitian berikut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan terkait Pengembangan Pariwisata, akan tetapi dengan obyek fokus dan lokasi yang tidak

						sama yakni Evaluasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata pada Obyek Wisata Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri
14.	<i>Journal of Public Policy and Management Review</i> , Vol 6 No. 2	Galuh Putri Cahyani, dan Drs. Aufarul Marom, M.Si (2015). Evaluasi Kebijakan Retribusi Tempat Rekreasi Di Kabupaten Kudus	memahami kebijakan retribusi tempat rekreasi kabupaten Kudus dalam rangka memaksimalkan pelayanan yang diberikan sarana rekreasi kabupaten, serta variabel-variabel yang memberikan dukungan kepada dan menghambat	Penelitian berikut ialah penelitian deskriptif dengan memakai pendekatan kualitatif dengan wawancara terhadap informan. Teori Evaluasi Kebijakan dari Subarsono (2013) : Memastikan tingkat kinerja suatu kebijakan, Menilai tingkat efisiensi suatu kebijakan, Menilai	Masih beberapa hal yang menghambat di tempat rekreasi pungutan, yang menyebabkan kesulitan untuk melaksanakan pemeliharaan dan melaksanakan inovasi pembangunan.	Penelitian berikut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan terkait Evaluasi Kebijakan, akan tetapi dengan obyek fokus dan lokasi yang tidak sama yakni Evaluasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata pada

			kebijakan tersebut.	tingkat produksi suatu kebijakan, Menilai pengaruh suatu kebijakan, Mewaspadaai terdapatnya penyimpangan, sebagai sumber bagi kebijakan yang akan datang		Obyek Wisata Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri
15.	<i>Journal of Social Community</i> , Vol 6, No. 2	Risalatul Ummah, Mohammad Hipni (2019). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Halal Dalam memaksimalkan Kepuasan Wisatawan Di Kabupaten Bangkalan	Mengidentifikasi penerapan kebijakan pengembangan pariwisata halal bagi wisatawan dalam segala keadaan, namun tujuan utama pariwisata halal ialah untuk memastikan kenyamanan wisatawan.	Wawancara terbuka dan kuesioner digunakan dalam penelitian kualitatif ini untuk mengumpulkan opini dan reaksi partisipan tentang wisata halal sebagai wisatawan. Baik Teori Kebijakan Negara R. Dye ataupun Teori Kepuasan Konsumen Kotler menyatakan bahwasannya kebijakan ataupun	Adanya kebijakan wisata halal tentunya akan memberikan dorongan kepada pengunjung muslim untuk datang ke tujuan wisata tersebut. Masyarakat di Pulau Madura merasa lebih tenang karena pengunjung mancanegara yang ingin berkunjung ke tempat wisata sudah	Penelitian berikut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan terkait Evaluasi Kebijakan, akan tetapi dengan obyek fokus dan lokasi yang tidak sama yakni Evaluasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata pada

				aturan yang berkaitan dengan pembangunan yang bisa menawarkan perspektif orang dalam dan digunakan untuk mengambil keputusan baik secara individu ataupun kolektif memiliki pengaruh langsung terhadap pertumbuhan pariwisata dalam jangka panjang.	mengetahui meski secara halus bahwasannya masyarakat Madura	Obyek Wisata Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri
--	--	--	--	---	---	--

Sumber : Di olah Peneliti (2024)

Berdasarkan pada Tabel di atas diketahui bahwa evaluasi kebijakan strategi pengembangan pariwisata menyatakan bahwa pengembangan pariwisata pada Obyek Wisata Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri belum optimal dalam mengatasi permasalahan pariwisata hal ini berdasarkan pada keterangan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Wonogiri, dan Kepala UPTD Obyek Wisata Waduk Gajah Mungkur, mengacu pada 1 (satu) strategi kebijakan yang yang perlu di tingkatkan yaitu pemasaran dan promosi perlu segera diperbaiki. Upaya promosi yang masih terbatas dan kurangnya inovasi dalam produk wisata menjadi kendala utama dalam menarik minat pengunjung lebih banyak. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan dalam hal diversifikasi produk wisata, pemanfaatan media sosial, serta kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan promosi. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan antara lain: pengembangan paket wisata yang lebih menarik, pemanfaatan teknologi digital dalam promosi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada pengunjung.

1.5.2 Administrasi Publik

1.5.2.1 Pengertian Administrasi Publik

Administrasi, menurut Siagian (2001:2), ialah proses kerjasama yang menyeluruh antara dua individu ataupun lebih berdasarkan logika tertentu untuk meraih tujuan yang sudah ditentukan. Definisi yang diberikan di atas mencakup hal-hal berikut: administrasi sebagai sebuah proses, administrasi sebagai seperangkat elemen yang tepat, dan administrasi sebagai sebuah seni. Sementara itu, Chander dan Plano menyatakan dalam Keban (2004:3) hal tersebut:

“Proses pengorganisasian dan koordinasi sumber daya dan personel publik untuk merumuskan, melaksanakan, dan melaksanakan pengelolaan keputusan publik dikenal sebagai administrasi publik.”

Namun, Henry menyatakan hal serupa dalam Harbani (2008: 8): “Administrasi publik ialah sintesis cangguh antara teori dan praktik yang bertujuan untuk memaksimalkan pengetahuan pemerintah tentang komunitas yang diawasinya dan memberikan dorongan kepada kemajuan kebijakan publik.

Administrasi publik ataupun negara ialah topik yang sering dieksplorasi dalam ilmu administrasi. Diterjemahkan dari bahasa Inggris sebagai “administrasi publik”, administrasi publik juga sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai “administrasi negara” ataupun “administrasi pemerintahan”. (Indradi, 2010:63).

Administrasi publik menurut Herbert A. Simon dalam buku *Public Administration* karya (Indradi, 2010: 107) ialah tindakan kolektif individu-individu yang melaksanakan upaya kolaboratif untuk meraih tujuan bersama. Singkatnya, administrasi negara ialah keseluruhan

tindakan yang diambil oleh perangkat pemerintahan sebuah negara dalam upaya meraih tujuan negara (Siagian, 2001:7).

Menurut Goerge J. Gorgon dalam Indradi (2010:72), administrasi publik mencakup seluruh aktivitas yang dilaksanakan oleh orang dan organisasi sehubungan dengan pemberlakuan, penerapan, dan penegakan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Dalam Indradi (2010:116), Nicholas Henry melontarkan pernyataan sebagai berikut:

Tujuan administrasi publik ialah untuk memaksimalkan respons kebijakan publik terhadap keperluan masyarakat dan untuk memaksimalkan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi antara orang-orang yang dikontrolnya dan masyarakat umum. Kombinasi teori dan praktik itu rumit. mengimplementasikan strategi manajemen yang lebih efektif dan efisien serta lebih memenuhi tujuan masyarakat ialah tujuan administrasi publik.

Berdasarkan berbagai definisi, administrasi publik bisa didefinisikan sebagai upaya kolaboratif oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk melembagakan manajemen birokrasi, kebijakan, penegakan hukum, dan pelayanan publik dengan tujuan akhir meraih tujuan nasional.

1.5.2.2 Paradigma Administrasi Publik

Nicholas Henry mencantumkan lima paradigma dalam pengelolaan negara, yang dijelaskan di bawah ini, dalam Keban (2014: 31) Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi ialah Paradigma 1 (1900–1926). Leonard D. White dan Frank J. Goodnow ialah tokoh dari pandangan dunia ini. Goodnow (1900) mengatakan dalam *“Politics and*

Administration” bahwasannya administrasi harus memperhatikan pelaksanaan kehendak rakyat ataupun melaksanakan kebijakan, sedangkan politik harus berkonsentrasi pada kebijakan ataupun ekspresi kehendak rakyat. Pemisahan antara lembaga legislatif yang bertugas mewakili kehendak rakyat dan lembaga eksekutif yang bertugas melaksanakannya ialah salah satu upaya untuk memisahkan politik dan pemerintahan. Dalam hal ini, badan peradilan membantu badan legislatif menetapkan tujuan serta menjadikan kebijakan. Paradigma ini menyiratkan bahwasannya administrasi harus dipandang sebagai pemerintahan yang bebas nilai dan fokus pada menghilangkan hambatan birokrasi pemerintah terhadap efisiensi dan perekonomian.

Paradigma 2 (1927–1937) dikenal dengan paradigma prinsip administrasi. Peserta terkenal dalam paradigma ini termasuk Willoughby, Gullick, dan Urwick. Fayol dan Taylor, dua tokoh terkemuka dalam manajemen klasik, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap mereka. Mereka menetapkan sentralitas prinsip-prinsip administrasi dalam administrasi publik. Ide-ide ini terkandung dalam kerangka POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Controlling, Reporting, and Budgeting*), yang diklaim bisa diterapkan secara universal. Namun, karena gagasan-gagasan ini didasarkan pada gagasan bahwasannya gagasan-gagasan tersebut bisa diterapkan di mana pun, bahkan di lembaga-lembaga pemerintah, maka lokasi pasti administrasi publik belum pernah ditetapkan.

Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik dikenal dengan Paradigma 3 (1950–1970). Buku "*Elements Of Public Administration*" diedit oleh Morstein-Marx pada tahun 1946. Di dalamnya, ia mempertanyakan kelayakan ataupun ketidakpraktisan pemisahan politik dan administrasi, sementara Herbert Simon mengkritik penerapan prinsip-prinsip administrasi yang tidak konsisten. Karena banyaknya kelemahan dalam prinsip-prinsip administrasi publik, berkembanglah paradigma baru yang memandang administrasi publik sebagai ilmu politik dengan birokrasi pemerintahan sebagai titik fokusnya. Sayangnya, orang-orang yang mengkritik prinsip-prinsip administrasi gagal untuk menyajikan solusi terhadap penekanan sempit yang diterapkan oleh administrasi publik.

Administrasi publik sebagai ilmu administrasi ialah pokok bahasan Paradigma 4 (1956–1970). Konsep-konsep manajemen yang dahulu disukai dieksplorasi secara menyeluruh dan ilmiah dalam paradigma ini. Paradigma ini berfokus pada perilaku organisasi, analisis manajemen, pemakaian teknologi kontemporer, termasuk pendekatan kuantitatif, analisis sistem, riset operasi, dll. Paradigma ini memiliki dua arah pengembangan: satu fokus pada kebijakan publik, sementara yang lain fokus pada kemajuan organisasi. ilmu administrasi murni dengan bantuan psikologi sosial. Diharapkan bahwasannya setiap penekanan yang dihasilkan di sini bisa diterapkan baik dalam domain komersial ataupun

administrasi publik. Itu ialah lokusnya, oleh karena itu tidak bisa dibagi-bagi.

Administrasi publik sebagai administrasi publik menjadi fokus Paradigma 5 (1970–sekarang). Lokasi dan tujuan paradigma ini jelas. Paradigma ini menempatkan teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik sebagai pusat administrasi publik, dengan keprihatinan dan kepentingan publik sebagai pusat kegiatannya.

Paradigma keenam dan terkini, yang dikenal dengan istilah *governance*, diartikan sebagai pemakaian kekuasaan dan wewenang oleh para pemimpin politik untuk kepentingan rakyat. Ini ialah proses multifaset di mana berbagai sektor masyarakat memegang kekuasaan, menjadikan dan menyebarkan kebijakan publik yang berdampak langsung pada institusi dan masyarakat, serta berdampak pada pembangunan sosial dan ekonomi (Tamayao dalam Astuti dkk, 2020). Sebuah teori yang mendapat perhatian di sejumlah negara berkembang, termasuk Indonesia. Tiga entitas sektor publik, sektor komersial, dan masyarakat sipil mengimplementasikan paradigma tata kelola dan berkontribusi terhadap pembangunan. Sektor publik dan swasta mulai dilibatkan dalam inisiatif pembangunan pemerintah. Tujuan dari inisiatif pembangunan di negara-negara berkembang ialah untuk menyatukan perspektif dan program pembangunan yang tidak sama untuk meraih tujuan yang sudah ditetapkan. Istilah "kolaborasi" mengacu pada hubungan kerja sama yang

dilaksanakan oleh pihak-pihak tertentu ketika mencoba mengintegrasikan ide-ide.

1.5.2.3 Ruang Lingkup Administrasi Publik

Permasalahan sosial berdampak pada rumitnya berbagai administrasi publik yang berkembang. Menurut Pasolong (2017:24), ditemukan sembilan (9) bidang administrasi publik yang berbeda-beda, antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan Publik

Definisi kebijakan ialah serangkaian kegiatan yang diperoleh dari pemeriksaan terhadap pilihan-pilihan yang potensial. Alternatif-alternatif tersebut mengacu pada beberapa kemungkinan yang pada akhirnya akan ditentukan menjadi pilihan terbaik untuk diambil dengan fokus pada kepentingan masyarakat umum. Analisis, pengembangan, ratifikasi, implementasi, dan penilaian kebijakan semuanya termasuk dalam proses kebijakan publik.

2. Birokrasi Publik

Penyelenggaraan pemerintahan ialah fungsi utama birokrasi yang pada hakikatnya ialah kesatuan pemerintahan pusat dan daerah.

3. Manajemen Publik

Bidang manajemen publik mencakup tanggung jawab manajemen manajer publik, termasuk kebijakan, keuangan, informasi, sumber daya manusia (SDM), dan manajemen hubungan eksternal.

4. Kepemimpinan

Konsep-konsep yang terkait erat dengan pemimpin, seperti persyaratan kepemimpinan, kualitas yang menjadikan seorang pemimpin yang baik, tugas dan fungsi yang terkait dengan kepemimpinan, jenis kepemimpinan, dan gaya kepemimpinan, semuanya terkait dengan kepemimpinan.

5. Pelayanan Publik

Kebahagiaan penerima pelayanan dan mutu pelayanan beserta parameternya berkaitan dengan pelayanan publik.

6. Administrasi Kepegawaian Negara

Penyelenggaraan kepegawaian negara dikaitkan dengan manajemen kepegawaian, yakni penataan dan pengarahan kebijakan publik untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Cakupan pekerjaan tersebut mencakup pengangkatan PNS (pengorganisasian kebutuhannya, analisa keperluan kerja, pembentukan, pengangkatan, pengangkatan CPNS, pengklasifikasian, dan pemberhentian PNS), penetapan gaji, evaluasi pelaksanaan pekerjaan, penetapan pangkat dan jabatan, pemberian pelatihan bagi pegawai negeri sipil, pembantu, dan pekerja yang dipecat dan pensiun.

7. Manajemen Kinerja

Karena pengukuran kinerja ialah komponen penting dalam manajemen berbasis kinerja dan ialah sarana penting dalam mengimplementasikan akuntabilitas kinerja, maka manajemen kinerja mengatasinya.

8. Etika Administrasi Publik

Kode etik yang menunjukkan nilai-nilai dan karakteristik pejabat publik ialah inti dari etika.

9. *Good Governance*

Fokus tata kelola pemerintahan yang baik di sektor publik ialah mewujudkan prinsip dan komponen tata kelola pemerintahan yang baik dalam sebuah negara.

Kebijakan publik terkait pengembangan pariwisata, khususnya tujuan wisata Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri, menunjukkan luasnya kajian ini. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan publik ini bertujuan untuk meraih tata kelola pemerintahan yang unggul di bidang pariwisata.

1.5.3 Kebijakan Publik

1.5.3.1 Pengertian Kebijakan Publik

Dalam masyarakat, masyarakat pada umumnya mengetahui makna dan isi kebijakan publik, baik langsung ataupun tidak langsung, serta berbagai peristiwa dan kegiatan yang berlangsung di pemerintahan. Para ahli sudah menyuarakan berbagai perspektif dengan makna yang berbeda-beda. Kebijakan publik menurut Dye didefinisikan sebagai “*Whatever governments chooses to do or not to do*”. Apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan disebut kebijakan publik. Pengetahuan ini menunjukkan bahwasannya pemerintah memiliki kekuasaan untuk memutuskan

kebijakan mana yang akan diambil ataupun tidak, berdasarkan permasalahan yang muncul ataupun tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut. Sedangkan konsep kebijakan Anderson dalam Nugroho menggambarkan kebijakan sebagai “*A relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actor in dealing with a problem or matter of concern.*” Kebijakan ialah serangkaian tindakan dengan tujuan yang ditetapkan oleh satu ataupun lebih aktor untuk mengatasi sebuah masalah ataupun isu.

Carl I. Friedrich dalam Leo Agustino (2008:7) dalam mengutarakan kebijakan publik dalam Nugroho ialah serangkaian tindakan yang disarankan oleh individu, kelompok, ataupun pemerintah dalam lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang, dengan usulan kebijakan yang ditujukan untuk memaksimalkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ditemukan untuk meraih tujuan tertentu.

Menurut Dye dalam Widodo (2008), ditemukan tiga komponen sistem kebijakan: “(a) pemangku kepentingan kebijakan, (b) pelaku kebijakan (isi kebijakan), dan (c) lingkungan kebijakan (*policy environment*)”. Teori ini mengarah pada kesimpulan bahwasannya pemerintah merumuskan kebijakan untuk meraih tujuan tertentu, dengan para pemain berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan lingkungan. Menurut Anderson dalam Islamy Dalam Widodo, kebijakan publik terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) Kebijakan selalu diarahkan ataupun memiliki tujuan.

- 2) Tindakan ataupun pola perilaku pejabat pemerintah dimasukkan dalam kebijakan.
- 3) Kebijakan ialah hasil tindakan nyata pemerintah, bukan sekadar niatnya.
- 4) Kebijakan publik mungkin positif, termasuk tindakan pemerintah terhadap isu tertentu, ataupun negatif, jika pejabat pemerintah memilih untuk tidak mengambil tindakan apa pun.
- 5) Peraturan dan regulasi yang kuat dan berwibawa ialah landasan bagi setiap kebijakan publik yang konstruktif.

Merumuskan masalah ialah langkah utama dalam proses pengambilan kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan kemasyarakatan. Perumusan masalah ialah salah satu tahapan pengambilan kebijakan. Dunn menjelaskan sejumlah aspek krusial dalam permasalahan kebijakan, antara lain:

- a) Keterkaitan kebijakan itu penting. Masalah pada kebijakan satu bidang terkadang mempengaruhi kebijakan bidang lainnya. Menurut Ackoff dalam Dunn, permasalahan kebijakan sebenarnya ialah komponen dari sebuah sistem permasalahan yang lebih besar yang lebih dipahami sebagai sebuah meses, ataupun sebuah sistem faktor luar yang menimbulkan ketidakpuasan di antara berbagai kelompok masyarakat.
- b) Sensitivitas kebijakan itu penting. Faktor eksternal penyebab masalah diidentifikasi, dikategorikan, diklarifikasi, dan

dievaluasi secara selektif. Walaupun ditemukan anggapan bahwasannya permasalahan memiliki sifat objektif, ditemukan beberapa upaya untuk melakukan evaluasi fakta terkait masalah yang sama.

- c) Bahwa isu tersebut dibuat-buat. Hanya ketika masyarakat mengambil keputusan apakah akan mengubah situasi bermasalah ataupun tidak, barulah persoalan kebijakan bisa muncul. Permasalahan kebijakan bisa dianggap sebagai gambaran sah tentang keadaan sosial yang objektif; hal-hal tersebut juga ialah hasil ataupun konsekuensi dari penilaian subjektif manusia; dan mereka bisa diubah secara sosial.
- d) Dinamika isu kebijakan. sebuah masalah mungkin memiliki jawaban yang berbeda-beda, begitu pula upaya yang tidak sama untuk mendefinisikannya. Karena permasalahan dan solusinya selalu berubah, maka permasalahan tersebut tidak pernah benar-benar terselesaikan. Bahkan jika masalahnya sendiri tidak ketinggalan jaman, solusi terhadapnya mungkin sudah ketinggalan jaman.

Konsep kebijakan publik dalam penyelesaian masalah tidak terbatas pada satu gagasan saja. “Respon sistem politik terhadap tuntutan/klaim dan dukungan yang mengalir dari lingkungannya” ialah bagaimana Anderson, dalam LAN di Widodo, menggambarkan kebijakan publik. 12 Kebijakan yang menangani permasalahan

kemasyarakatan dibuat dengan prinsip-prinsip yang selaras dengan norma-norma yang sudah ada. Cocok untuk daerah yang kebijakannya mungkin berdampak, baik secara langsung ataupun tidak langsung. “Setiap kebijakan publik mengandung seperangkat nilai, sehingga ketika pemerintah mengambil suatu nilai, saat itulah pemerintah menyajikan nilai-nilai tersebut kepada masyarakat,” kata David Easton dalam Dye di Subarsono. Oleh karena itu, Harold Laswell dan Abraham Kaplan berpendapat dalam Dye in Subarsono bahwasannya “kebijakan publik harus memuat tujuan, nilai, dan praktik sosial yang ditemukan dalam masyarakat.” Untuk mencegah inkonsistensi dalam penerapannya ataupun dalam norma dan nilai-nilai masyarakat, kebijakan publik harus sejalan dengan hal tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan di atas, kebijakan publik bisa diartikan sebagai serangkaian tindakan ataupun prosedur yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan publik yang menggabungkan gagasan ataupun prinsip yang selaras dengan keyakinan dan nilai-nilai masyarakat. ditemukan individu ataupun kelompok yang memiliki keterlibatan dalam perumusan kebijakan publik pada setiap tahapan yang dilaluinya.

1.5.3.2 Proses Kebijakan Publik

Ada beberapa langkah ataupun prosedur yang butuh diselesaikan dalam rangka melaksanakan kebijakan publik. Beragam sudut pandang dianut oleh beberapa pakar tentang proses kebijakan publik.

Santosa (2008:36) mengutip Anderson yang mengatakan bahwasannya proses kebijakan publik terdiri atas lima tahap:

1. Formulasi Masalah (*Problem formulation*) :

Apa masalahnya? Mengapa ini menjadi masalah kebijakan?

Dengan upaya apa isu ini bisa disampaikan kepada pemerintah ataupun menjadi agenda?

2. Formulasi (*Formulation*) :

Bagaimana solusi ataupun alternatif bisa dikembangkan untuk mengatasi masalah ini? Siapa pun yang memiliki keterlibatan dalam pembuatan kebijakan?

3. Penentuan Kebijakan (*Adoption*) :

Bagaimana seleksi dan penggantian dilakukan? Persyaratan ataupun kriteria apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan mengimplementasikan kebijakan tersebut? Metode dan teknik apa saja yang diterapkan dalam implementasi kebijakan tersebut? Konten tertentu apa yang terkandung dalam kebijakan yang ditetapkan?

4. Implementasi (*Implementation*) :

Siapa yang melaksanakan pelaksanaan kebijakan? Bagaimana upaya mereka melaksanakan sesuatu? Apa akibat substansi kebijakan tersebut?

5. Evaluasi (*Evaluation*) :

Bagaimana efektivitas ataupun akibat kebijakan tersebut diukur? Siapa yang menilai kebijakan? Adakah permintaan modifikasi ataupun pembatalan?

Sebaliknya, Jones menyarankan langkah-langkah kebijakan publik yang lebih banyak dalam Santosa (2008:36) dibandingkan Anderson. Menurut Jones, kebijakan publik lewat tahapan sebagai berikut:

- 1) Persepsi
- 2) Definisi
- 3) Agresi (Perggerakakan)
- 4) Organisasi Representasi (perwakilan)
- 5) Formulasi
- 6) Legitimasi
- 7) Aproiasi (Ketetapan, Implementasi, Evaluasi)
- 8) Terminasi (Penyelesaian)

Karena ditemukan beberapa proses dan faktor yang memiliki keterlibatan dalam proses kebijakan publik, maka hal tersebut ialah proses rumit yang memerlukan kajian. Hasilnya, banyak pakar yang menunjukkan minat besar dalam meneliti kebijakan publik, dan membagi proses-proses tersebut ke dalam tahap-tahap yang disebutkan di atas. Tujuannya ialah untuk menyederhanakan proses mempelajari kebijakan publik. Dari penjelasan sebelumnya sudah jelas bahwasannya kebijakan publik ialah kumpulan prosedur. tindakan yang dilaksanakan

pemerintah dengan tujuan menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat.

Proses kebijakan publik memiliki beberapa tahapan, salah satunya ialah implementasi kebijakan, seperti yang bisa disimpulkan dari uraian sebelumnya. Karena tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dalam meraih tujuan mungkin akan berdampak pada keseluruhan kebijakan selama implementasi. Tanpa terdapatnya eksekusi tersebut, maka kebijakan tersebut akan tetap menjadi pembahasan.

1.5.3.3 Strategi serta Arah Kebijakan (pemasaran mengambil dari 6 poin)

Untuk melaksanakan pengelolaan setiap program kegiatan dan meraih tujuan, pemerintah daerah butuh memiliki strategi, yang bisa diartikan sebagai ilmu, seni, ataupun wawasan (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017). Sementara itu, rencana pembangunan daerah yang mengutamakan pencapaian maksud dan tujuan pelaksanaan misi pembangunan dituangkan dalam arah kebijakan. Arah strategi serta kebijakan akan menawarkan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan sesuai dengan visi dan tujuan kepala daerah guna memenuhi maksud dan tujuan perencanaan pembangunan daerah. Selain hal tersebut, transformasi, reformasi, dan peningkatan efektivitas pemerintahan daerah melalui penerapan strategi serta kebijakan bisa digunakan untuk melaksanakan pelaksanaan seluruh program kegiatan, baik internal ataupun eksternal, pelayanan dan administrasi, serta perencanaan, pemantauan, dan evaluasi. panduan.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2013- 2028. Adapun bunyi pasal 33 yang dimaksud dengan strategi untuk pementapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi kegiatan:

- a. Meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi pariwisata yang diprioritaskan;
- b. Meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, berkembang, dan baru;
- c. Mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. Mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- e. Meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh destinasi pariwisata; dan
- f. Intensifikasi pemasaran wisata pertemuan (Meeting), insentif (Incentive), konvensi (Convention) dan pameran (Exhibition) yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Penelitian ini berfokus pada pasal 33 poin A yaitu meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi pariwisata yang diprioritaskan yang akan melakukan evaluasi kebijakan promosi dan pemasaran pengembangan pariwisata Obyek Wisata Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri.

1.5.4 Evaluasi Kebijakan Publik

1.5.4.1 Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik

Kata “*evaluation*” berasal dari kata Inggris “*evaluation*” yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dengan maksud untuk mempertahankan makna aslinya. Pengucapan bahasa Indonesia dari kata tersebut sedikit diubah menjadi “evaluasi” yang berarti menyajikan penilaian kuantitatif dengan membandingkan sesuatu dengan satuan tertentu. Proses mengamati dan menganalisis efektivitas sebuah program, melakukan evaluasi dampaknya terhadap perubahan, dan menentukan apakah program tersebut harus diperluas, dipertahankan, ataupun ditingkatkan disebut evaluasi. Selain hal tersebut, tentang evaluasi sistem informasi—prosedur yang menyelidiki dan memastikan ruang lingkup kegiatan implementasi sistem informasi—dari sudut pandang organisasi, persepsi pengguna, dan teknologi sistem informasi (Hakam, 2016).

Lester dan Stewart (Winarno, 2008: 166) menyatakan bahwasannya penilaian kebijakan bisa dipecah menjadi dua tugas berbeda: melakukan evaluasi kebijakan untuk mengidentifikasi hasilnya dan menentukan apakah kebijakan tersebut berhasil ataupun tidak. standar ataupun kebijakan berdasarkan standar. Perubahan bisa dilaksanakan lewat evaluasi kebijakan, yang mencakup penilaian dan evaluasi hasil kerja sebuah program serta pelaksanaan kebijakan dan pengaruhnya terhadap hasil tersebut.

Kebijakan yang dibuat ataupun diusulkan ditujukan untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Hasil kompromi antara legislatif dan eksekutif ialah kebijakan-kebijakan yang dibuat ataupun direncanakan. Menurut Hofferbert, kebijakan ialah hasil pilihan yang diambil oleh aktor-aktor tertentu untuk kepentingan masyarakat. Lebih lanjut, Hofferbert menyajikan dua penafsiran terhadap sebuah kebijakan. Pertama, mengkaji sebuah kebijakan dari intinya (yaitu, formulasi editorial yang menguraikan “tujuan” yang ingin dicapai); Kedua, proses penerapan kebijakan menunjukkan kepada kita akibat dan hasil kebijakan tersebut, baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang (Samodra Wibawa, 1994: 49).

Samodra Wibawa (1994: 50) mengutarakan kebijakan sebagai sebuah sistem dengan tiga komponen yang saling bergantung. Kebijakan publik itu sendiri, lingkungan kebijakan, dan pelaku kebijakan ialah ketiga elemen tersebut. Masing-masing dari ketiga elemen ini mempengaruhi elemen lainnya. Elemen-elemen ini bisa dibahas secara menyeluruh:

- a) Para aktor yang membentuk kebijakan, yang mencakup individu, kelompok, dan organisasi non-pemerintah. Keduanya memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan.

- b) Lingkungan kebijakan. Yang dimaksud dengan “lingkungan hidup” ialah aspek-aspek kehidupan masyarakat yang mungkin ataupun seharusnya dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan, bukan individu ataupun organisasi yang ditemukan disekitarnya dan memiliki keputusan akhir atas kebijakan pemerintah (semuanya termasuk dalam kategori pelaku/aktor kebijakan).
- c) Kebijakan publik, yang mengacu pada serangkaian alternatif tindakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan (atau penyelesaian masalah) dalam kehidupan masyarakat.

Dengan melihat hasil-hasil kebijakan, terlihat jelas bahwasannya kebijakan sebenarnya sangat tidak sama dengan rekomendasi yang dibuat dalam pernyataan kebijakan. Kami bisa membedakan antara inisiatif-inisiatif ini dan akibat serta hasil dari kebijakan-kebijakan tersebut. Hasil kebijakan lebih terkait erat dengan pelaksanaan kebijakan publik, walaupun akibat ataupun hasil kebijakan lebih terkait erat dengan pengaruh terhadap masyarakat yang diinginkan ataupun tidak diinginkan yang diakibatkan oleh tindakan ataupun ketidakaktifan pemerintah (Anderson, dalam Budi Winarno, 2004:19- 20).

Kebijakan mungkin tidak sama secara signifikan dari apa yang disarankan dalam pernyataan kebijakan, sebagaimana dibuktikan dengan penyelidikan terhadap hasil-hasil kebijakan. Kita bisa membedakan antara akibat kebijakan dan hasil kebijakan dengan upaya ini. akibat ataupun hasil kebijakan lebih erat kaitannya dengan akibat

terhadap masyarakat yang timbul akibat tindakan ataupun ketidakaktifan pemerintah, baik akibat tersebut disengaja ataupun tidak. Hasil kebijakan lebih didasarkan pada penerapan kebijakan publik yang sebenarnya (Anderson, dalam Budi Winarno, 2004:19- 20).

Menurut William N. Dunn (2003:608–610), istilah “evaluasi” memiliki beberapa konotasi, yang kesemuanya berkaitan dengan penerapan skala nilai yang tidak sama terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi sama dengan penilaian, pemeringkatan, dan penilaian. Evaluasi bertujuan untuk menyajikan pengetahuan tentang nilai ataupun keuntungan dari hasil kebijakan. Evaluasi menyajikan informasi yang tepat dan bisa dipercaya tentang efektivitas kebijakan, yaitu sejauh mana peluang, nilai, dan keperluan sudah dipenuhi melalui tindakan pemerintah. Evaluasi membantu pemakaian pendekatan analisis kebijakan lainnya, seperti perumusan isu dan pembuatan proposal. Walaupun penilaian ini juga mempertimbangkan keseluruhan proses kebijakan, kinerja kebijakan khususnya pelaksanaan kebijakan publik merupakan fokus utama penilaian kebijakan.

Banyak fitur yang membedakan penilaian kebijakan dengan teknik analisis lainnya. Dunn (2003:608–609) menyatakan bahwasannya penilaian tidak sama dari pendekatan analisis kebijakan lainnya dalam beberapa hal.

- 1) Fokus nilai: Tujuan penilaian ialah untuk menentukan apakah sebuah program ataupun kebijakan diperlukan ataupun bernilai.

Evaluasi lebih dari sekedar pengumpulan data tentang hasil kegiatan kebijakan yang direncanakan; ini juga ialah upaya untuk memastikan manfaat ataupun kegunaan sebuah program ataupun kebijakan bagi masyarakat. Evaluasi melibatkan teknik untuk menilai tujuan serta sasaran itu sendiri karena selalu ditemukan ruang untuk perdebatan tentang kesesuaian tujuan serta sasaran kebijakan;

- 2) Saling mengandalkan Fakta Nilai. Tuntutan evaluasi didasarkan pada cita-cita dan fakta, mengatakan bahwasannya sebuah program ataupun kebijakan tertentu sudah meraih kinerja terbaik (atau terendah) memerlukan lebih dari sekedar menyatakan bahwasannya hasil kebijakan tersebut bermanfaat bagi banyak orang, komunitas, ataupun seluruh peradaban. Hal ini harus didukung oleh bukti bahwasannya langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi permasalahan tertentu benar-benar menyajikan hasil kebijakan yang diinginkan. Oleh karena itu, pemantauan diperlukan sebelum penilaian;
- 3) Penekanan pada masa lalu dan masa kini. tidak sama dengan tuntutan advokasi yang lebih fokus pada hasil di masa depan, tuntutan evaluatif lebih fokus pada hasil di masa lalu dan saat ini. Ex-post, ataupun setelah tindakan selesai dilakukan, evaluasi dilaksanakan secara retrospektif. Rekomendasi memiliki sifat

prospektif, dikeluarkan sebelum kegiatan berlangsung, dan memasukkan premis nilai (*ex-ante*);

- 4) Dualitas Nilai. Sifat ganda dari nilai-nilai yang melandasi tuntutan evaluasi berasal dari persepsi mereka sebagai sarana dan tujuan. Ketika menyangkut nilai-nilai mapan yang memiliki sifat intrinsik—yang penting bagi diri mereka sendiri—atau ekstrinsik—yang diperlukan karena nilai-nilai tersebut memengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain—evaluasi setara dengan dukungan. Hirarki nilai sering kali dipakai untuk mewakili signifikansi relatif dan keterkaitan tujuan serta sasaran.

1.5.4.2 Tujuan Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Badjri dan Yuwono (2002:132), tujuan dari evaluasi publik bisa membantu dalam lima aspek, antara lain :

1. Tentukan apakah kebijakan tersebut masih butuh ditegakkan mengingat perkembangan saat ini.
2. Sampaikan pendapat Anda tentang apakah ditemukan metode alternatif yang lebih praktis dan efisien untuk mengimplementasikan kebijakan ini.
3. Verifikasi apakah akibat kebijakan yang diharapkan sudah terealisasi sebagaimana yang diharapkan.
4. Tentukan apakah program tersebut butuh dihentikan seluruhnya, dipersingkat, diperluas, ataupun keduanya.

5. Tentukan apakah pendanaan dukungan kebijakan harus ditingkatkan, dikurangi, ataupun dihilangkan sama sekali di masa depan. memaksimalkan kredibilitas pemerintah, khususnya dalam konteks akuntabilitas kebijakan publik secara umum.

Sedangkan menurut Subarsono dalam Suwitri (2009:90-91), evaluasi kebijakan memiliki beberapa tujuan yaitu:

- 1) Menilai efektivitas sebuah kebijakan dengan mempelajari seberapa baik tujuan serta sasarnya tercapai.
- 2) Menentukan efektivitas sebuah kebijakan dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya.
- 3) Menentukan jumlah dan kaliber belanja terkait kebijakan untuk mengukur tingkat keluaran kebijakan.
- 4) Menilai akibat sebuah kebijakan pada tahap selanjutnya, baik yang menguntungkan ataupun yang tidak menguntungkan.
- 5) Untuk mengetahui ditemukan tidaknya variasi dengan upaya membandingkan pencapaian sasaran dengan tujuan serta sasaran.
- 6) Sebagai sarana menghasilkan kebijakan yang lebih baik lewat masukan kebijakan masa depan.

1.5.4.3 Sifat Evaluasi Kebijakan Publik

Penciptaan tuntutan evaluatif ialah ciri utama evaluasi. Fakta (Apakah ditemukan sesuatu?) dan tindakan (Apa yang harus dilakukan?) bukanlah pertanyaan utama. Akibatnya, penilaian tidak sama dari teknik analisis kebijakan lainnya dalam beberapa hal:

1. Faktor Nilai

Berbeda dengan pemantauan, evaluasi berpusat pada penentuan keperluan ataupun nilai sebuah program ataupun kebijakan. Evaluasi bukan sekadar upaya mengumpulkan data tentang hasil tindakan kebijakan yang diharapkan dan tidak diharapkan; ini juga ialah upaya untuk memastikan manfaat sosial ataupun kegunaan sebuah program ataupun kebijakan. Evaluasi melibatkan teknik untuk menilai maksud dan tujuan kebijakan karena selalu ditemukan ruang keraguan tentang kebenarannya.

2. Interdependensi Fakta-Nilai

"Fakta" dan "nilai" menjadi dasar persyaratan evaluasi. Untuk menyatakan bahwasannya suatu program ataupun kebijakan tertentu sudah meraih tingkat kinerja tertinggi (atau terendah), butuh diberikan bukti bahwasannya hasil kebijakan yang nyata merupakan hasil langsung dari langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi permasalahan tertentu. Hal ini lebih dari sekedar mengatakan bahwasannya beberapa orang, organisasi, ataupun masyarakat secara keseluruhan mendapat manfaat dari hasil kebijakan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan observasi sebelum evaluasi.

3. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau

Berbeda dengan tuntutan advokasi yang lebih fokus pada hasil di masa depan, tuntutan evaluatif lebih fokus pada hasil di masa

lalu dan saat ini. Evaluasi dilaksanakan secara retrospektif dan *ex post*, yakni setelah tindakan selesai dilakukan. Rekomendasi diberikan secara prospektif, *ex ante*, dan melibatkan premis nilai selain informasi lainnya.

4. Dualitas Nilai

Sifat ganda dari nilai-nilai yang melandasi tuntutan evaluasi berasal dari persepsi mereka sebagai sarana dan tujuan. Sejauh hal tersebut berkaitan dengan nilai-nilai saat ini seperti kesehatan, misalnya yang mungkin dianggap intrinsik diperlukan demi kepentingan diri sendiri ataupun ekstrinsik diperlukan karena berdampak pada pencapaian tujuan lain evaluasi dan saran ialah setara. Hirarki nilai sering kali dipakai untuk mewakili signifikansi relatif dan keterkaitan tujuan serta sasaran.

1.5.4.4 Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi sangat penting dalam analisis kebijakan karena sejumlah alasan penting. Yang pertama dan terpenting, evaluasi menyajikan informasi yang tepat dan bisa dipercaya tentang efektivitas kebijakan, yaitu sejauh mana peluang, kebutuhan, dan nilai-nilai sudah dipenuhi melalui tindakan pemerintah. Di sini, evaluasi menunjukkan sejauh mana tujuan serta sasaran tertentu (kesehatan yang lebih baik) sudah tercapai.

Kedua, evaluasi membantu dalam penjelasan dan kritik terhadap prinsip-prinsip yang memandu pilihan tujuan serta tolok ukur. Dengan

mempertanyakan secara metodis apakah tujuan serta ambisi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, nilai-nilai juga dipertanyakan. Analisis mungkin menyelidiki sumber nilai alternatif (seperti kelompok kepentingan, pegawai negeri, dan kelompok masyarakat) dan landasannya dalam berbagai jenis rasionalitas (teknis, ekonomi, hukum, sosial, dan substantif) untuk menantang kesesuaian tujuan serta sasaran.

Ketiga, bantuan penilaian dalam penerapan teknik lain yang dipakai dalam analisis kebijakan, seperti pengembangan saran dan masalah. Perumusan kembali permasalahan kebijakan bisa memperoleh manfaat dari informasi tentang kinerja kebijakan yang tidak memadai, misalnya jika informasi tersebut menyarankan supaya tujuan serta target harus dirumuskan kembali. Dengan menunjukkan perlunya mengganti pilihan-pilihan kebijakan yang sebelumnya disukai dengan pilihan-pilihan baru, evaluasi juga bisa membantu dalam menentukan alternatif kebijakan baru ataupun reformasi kebijakan.

1.5.4.5 Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik

Analisis memakai beberapa kriteria untuk menilai hasil kebijakan ketika menghasilkan data tentang kinerja kebijakan. Proposal kebijakan sudah dibahas sehubungan dengan kriteria semacam ini. Kriteria rekomendasi dipakai *ex ante*, sedangkan kriteria evaluasi diterapkan *ex post*, ataupun berlaku surut. Inilah perbedaan utama antara kedua jenis kriteria tersebut.

Tabel 1. 5 Kriteria Evaluasi

TIPE KRITERIA	PERTANYAAN
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan sudah dicapai?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk meraih hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi ataupun nilai kelompok-kelompok tertentu?
Ketetapan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna ataupun bernilai?

Sumber : William N. Dunn (2003:609)

Serupa dengan kriteria yang dipakai dalam evaluasi kebijakan, William N. Dunn (2003: 609) mengajukan sejumlah kriteria untuk rekomendasi kebijakan. Kriteria tersebut antara lain:

1. Efektifitas (*effectiveness*).

Berfokus pada apakah pengganti meraih hasil yang diharapkan ataupun efek yang diantisipasi (konsekuensi). Rasionalitas teknis

dan efektivitas sangat terkait. Efektivitas biasanya dinyatakan dalam satuan barang ataupun jasa ataupun nilai moneter.

2. Efisiensi (*efficiency*).

Mengenai kuantitas kerja yang diperlukan untuk meraih tingkat kemanjuran tertentu. Rasionalitas ekonomi, sering dikenal sebagai efisiensi, ialah hubungan antara kemanjuran dan upaya, dan upaya tersebut biasanya diukur dalam bentuk pengeluaran moneter.

3. Kecukupan (*adequacy*).

Berfokus pada seberapa besar tingkat efektivitas memenuhi kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan permasalahan ataupun pada keperluan ataupun cita-cita. Tingkat korelasi antara hasil yang diproyeksikan dan pilihan kebijakan ditekankan pada kriteria kecukupan.

4. Perataan (*equity*).

Berkaitan dengan alokasi konsekuensi dan upaya di antara berbagai kelompok sosial dan terkait erat dengan alasan hukum dan sosial. Kebijakan yang memprioritaskan keadilan akan mendistribusikan hasil (seperti unit layanan ataupun manfaat finansial) ataupun upaya (seperti pengeluaran keuangan) secara merata. Kebijakan yang ditujukan untuk mengalokasikan sumber daya, peluang pendidikan, ataupun layanan pendidikan terkadang disalurkan berdasarkan standar keadilan. Kriteria kesetaraan sangat terkait dengan pertentangan perspektif etis tentang kewajaran

ataupun keadilan, serta landasan yang tepat untuk mengalokasikan sumber daya masyarakat.

5. Responsivitas (*responsiveness*).

Berfokus pada seberapa efektif suatu kebijakan bisa mengakomodasi persyaratan, preferensi, ataupun nilai-nilai kelompok masyarakat tertentu. Kriteria daya tanggap sangat penting karena, walaupun suatu analisis memenuhi seluruh kriteria yang berkaitan dengan kelayakan, kemanjuran, efisiensi, dan kesetaraan, analisis tersebut akan tetap gagal jika tidak menjawab keperluan aktual masyarakat yang ingin dibantu oleh kebijakan tersebut.

6. Ketepatan (*appropriateness*).

Karena gabungan dua ataupun lebih faktor dipertimbangkan ketika menentukan apakah sebuah kebijakan cocok, maka rasionalitas dan substantif sangat terkait dengan kriteria kesesuaian. Nilai tujuan program dan keandalan asumsi yang melandasinya disebut sebagai kesesuaian.

1.5.4.6 Metode Evaluasi Kebijakan Publik

Berbagai pendekatan dan strategi bisa membantu analis menilai efektivitas kebijakan. Di sisi lain, secara praktis seluruh strategi ini juga bisa dipakai dengan pendekatan lain dalam analisis kebijakan, seperti perumusan isu, perkiraan, dan pemantauan. Jadi, misalnya, asumsi tentang hubungan yang diharapkan antara tindakan kebijakan dan tujuan

kebijakan bisa dihasilkan lewat pemakaian analisis argumentasi. Menemukan konsekuensi kebijakan yang tidak diharapkan yang melemahkan tujuan program kebijakan bisa dilaksanakan dengan memakai analisis akibat silang. Demikian pula, jika analisis biaya-manfaat dari efektivitas biaya bisa diterapkan secara proaktif (*ex ante*) ataupun secara retrospektif (*ex post*), diskonto mungkin berkaitan dengan penilaian program kebijakan dan rekomendasi. Yang terakhir, metode untuk melacak hasil kebijakan sebelum dievaluasi, seperti analisis rangkaian terkontrol dan tampilan grafik serta data indeks, bisa menjadi sangat penting.

Saling ketergantungan antara perumusan isu, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi dalam analisis kebijakan ditunjukkan oleh fakta bahwasannya pendekatan yang tidak sama bisa diterapkan dengan berbagai metode analisis kebijakan. Evaluasi berdasarkan teori keputusan, evaluasi formal, dan evaluasi semu semuanya bisa memperoleh manfaat dari berbagai pendekatan dan strategi.

Tabel 1. 6 Teknik Evaluasi dengan Tiga Pendekatan

PENDEKATAN	TEKNIK
Evaluasi Semu	Sajian Grafik Tampilan Tabel Angka Indeks Analisis Seri Waktu Terinterupsi

	Analisis Seri-Terkontrol Analisis Diskontinyu-Regresi
Evaluasi Formal	Pemetaan Sasaran Klarifikasi Nilai Pemetaan Hambatan Analisis Dampak-Silang Diskonting
Evaluasi Keputusan Teoritis	Brainstroming Analisis Argumentasi Delphi Kebijakan Analisis Survai-Pemakai

Sumber : William N. Dunn (1999)

Evaluasi semu ialah metode yang menyajikan statistik yang akurat dan bisa dipercaya tentang hasil-hasil kebijakan dengan menggunakan pendekatan deskriptif tanpa berupaya menilai implikasi ataupun manfaat hasil-hasil tersebut bagi individu, kelompok orang, ataupun masyarakat tertentu secara keseluruhan. Prinsip mendasar dari evaluasi semu ialah bahwasannya ukuran manfaat ataupun nilai harus jelas ataupun tidak kontroversial. Evaluasi formal ialah proses menyajikan data yang tepat, tepat waktu, dan bisa dipercaya tentang hasil kebijakan yang sudah dijelaskan oleh administrator program dan pengambil keputusan melalui pemakaian metodologi deskriptif. Evaluasi formal beroperasi berdasarkan asumsi mendasar bahwasannya

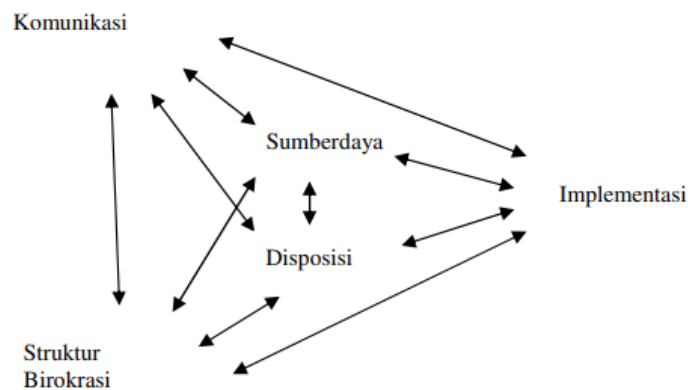
tujuan serta target yang dipublikasikan merupakan ukuran yang sesuai tentang nilai ataupun keuntungan dari pendekatan program. Di sisi lain, Evaluasi Teori Keputusan merupakan metodologi yang menggunakan pendekatan deskriptif untuk menyajikan informasi yang andal dan akurat tentang hasil kebijakan.

Tabel 1.5: Teknik Evaluasi dengan Tiga Pendekatan hanya mencantumkan satu metodologi yang kurang penjelasannya. Seperangkat metode yang disebut analisis survei pengguna dipakai untuk mendapatkan data tentang evaluasi sebuah program ataupun kebijakan dari calon pengguna dan pelaku kebijakan lainnya. Untuk memfasilitasi evaluasi evaluabilitas dan jenis evaluasi teori keputusan lainnya, diperlukan survei pengguna. Wawancara formal dengan beberapa pertanyaan terbuka ialah alat utama yang dipakai untuk mengumpulkan informasi. Menanggapi pertanyaan-pertanyaan ini, data yang diperlukan untuk memenuhi penjelasan sebelumnya tentang berbagai tahapan penilaian evaluabilitas—spesifikasi program kebijakan, pemodelan kebijakan-program, evaluasi program kebijakan, dan presentasi penilaian evaluabilitas oleh pengguna—disediakan.

1.5.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Kebijakan Publik

Para ahli menyatakan bahwasannya ditemukan beberapa model implementasi, George Edward III (1980) menjadi salah satunya. George Edward III menyatakan dalam Widodo (2010:96) bahwasannya ditemukan

empat elemen komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang mempengaruhi berhasil ataupun tidaknya sebuah program dilaksanakan.



Gambar 1. 1 Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi menurut Edward III
Sumber : Edward III dalam Subarsono (2006:91)

1.5.5.1 Komunikasi

Edward III menyatakan bahwasannya secara umum mencakup tiga (3) aspek krusial dalam proses komunikasi kebijakan transmisi: konsistensi, kejelasan, dan kejelasan, supaya sebuah kebijakan bisa diterapkan secara efektif, orang-orang yang mengambil keputusan harus terlebih dahulu memahami apa yang harus dilakukan. Perintah dan keputusan tidak bisa diikuti kecuali dikomunikasikan kepada staf yang tepat. Tentu saja pelaksana harus memahami komunikasi dengan penuh perhatian dan akurat.

Konsistensi ialah masalah dalam komunikasi ketika menyangkut instruksi implementasi. Anggota staf akan menjadi bingung dan terhambat oleh pilihan-pilihan yang bertentangan, yang akan mempersulit mereka dalam mengimplementasikan kebijakan dengan

benar. Sementara itu, berbagai faktor memberikan dorongan kepada komunikasi yang tidak merata dan menghambat penerapan kebijakan. Topik yang dibahas antara lain kejelasan, konsistensi, dan transmisi.

1. Transmisi (*transmission*)

Kebijakan publik butuh dijelaskan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, kepada pihak yang akan melaksanakannya, khalayak sasarannya, dan pihak berkepentingan lainnya.

2. Kejelasan (*clarity*)

Kebijakan tersebut harus disampaikan kepada pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak berkepentingan lainnya secara spesifik sehingga mereka bisa memahami maksud, tujuan, sasaran, dan substansi kebijakan publik serta mengetahui apa yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan. upaya yang tepat dan ringkas. agar kebijakan tersebut efektif dan berhasil.

3. Konsistensi (*consistency*).

Menjaga konsistensi diperlukan untuk mencegah para pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi bingung terhadap tindakan yang dilaksanakan.

1.5.5.2 Sumberdaya

Sumber daya manusia ialah salah satu elemen yang mempengaruhi seberapa baik kebijakan diimplementasikan. Menurut Edward III dalam Widodo, “staf mungkin merupakan sumber daya yang

paling penting dalam implementasi kebijakan” (2010:98). Edward III dikutip oleh Widodo (2010:98), yang menambahkan *“no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they”*.

Bahkan dengan perhatian yang cermat terhadap detail dan konsistensi, jika para pelaksana kebijakan tidak dilengkapi dengan alat-alat yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, perintah-perintah implementasi kemungkinan besar tidak akan berhasil. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kebijakan publik, sumber daya mungkin memainkan peran penting. Sumber daya terdiri atas kewenangan, informasi, fasilitas, dan sumber daya manusia.

1. Sumberdaya manusia

Sumber daya manusia ialah salah satu unsur yang menentukan berhasil ataupun tidaknya suatu kebijakan dijalankan. Komentar “sumber daya manusia harus mencukupi (dalam jumlah) dan cakap menyajikan informasi ahli” diutarakan oleh George Edward III pada tahun 1980 oleh Widodo (2017:98). Efektivitas implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia, baik dari segi jumlah ataupun kualitas (keahlian). Jika sumber daya manusia tidak mencukupi, baik kuantitas ataupun kualitas, maka eksekusi kebijakan akan gagal. Selain peraturan pelaksanaan, sumber daya manusia harus memadai untuk menyelesaikan tugas, mengikuti saran, dan menaati perintah atasan. Oleh karena itu, sumber daya

manusia harus secara hati-hati dan tepat menyeimbangkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dengan tingkat keahliannya sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya (Widodo, 2017:99).

2. Informasi

Sumber penting kedua untuk melaksanakan kebijakan ialah informasi. ditemukan dua jenis informasi. Pertama, pedoman pelaksanaan kebijakan. Pelaksana harus menyadari apa yang harus dilaksanakan dan bagaimana caranya. Kedua, informasi ialah data kepatuhan karyawan lain terhadap persyaratan hukum. Para pelaksana kebijakan butuh menyadari apakah mereka yang melaksanakan kebijakan tersebut mematuhi hukum ataupun tidak.

3. Wewenang

Agar perintah bisa dilaksanakan, otoritas pada umumnya harus memiliki sifat resmi. Otoritas mengacu pada legitimasi ataupun kekuasaan yang dimiliki oleh mereka yang melaksanakan program-program yang ditetapkan secara politik. Ketika tidak ditemukan otoritas, masyarakat tidak mengakui kekuasaan pelaksana, sehingga bisa menghambat proses penerapan kebijakan. Namun, ketika otoritas formal hadir dalam keadaan lain, orang sering salah menilai efektivitas otoritas tersebut. Di satu sisi, ketika pelaksana menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi ataupun kepentingan organisasi, kinerjanya akan menurun.

4. Fasilitas

Fasilitas sebenarnya memainkan peran penting dalam penerapan kebijakan. Bahkan dengan personel yang cukup, pengetahuan tentang apa yang butuh dilakukan, dan wewenang untuk melaksanakan tanggung jawab mereka, para pelaksana kebijakan tidak bisa berhasil mengimplementasikan sebuah kebijakan tanpa dukungan infrastruktur dan fasilitas.

1.5.5.3 Disposisi

Disposisi pelaksana mengacu pada kepribadian dan sifat mereka, seperti dedikasi, integritas, dan kecenderungan demokratis. Disposisi yang positif akan memungkinkan pelaksana kebijakan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud oleh pembuat kebijakan. Proses implementasi kebijakan juga tidak akan berhasil apabila para pelaksana memiliki sikap ataupun pandangan yang tidak sama dengan pengambil kebijakan.

1.5.5.4 Struktur Birokrasi

Edward III menyoroti bahwasannya struktur birokrasi mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan publik (Agustino, 2008: 153–154). Bahkan ketika sumber daya tersedia dan pelaksana kebijakan sadar akan apa yang butuh dilakukan dan berkeinginan untuk melakukannya, ditemukan kemungkinan bahwasannya suatu kebijakan tidak akan terealisasi ataupun dilaksanakan karena terdapatnya kelemahan dalam sistem birokrasi. Dibutuhkan upaya tim untuk

melaksanakan kebijakan rumit ini. Jika kebijakan yang ditemukan tidak diikuti oleh sistem birokrasi, sumber daya akan menjadi tidak efektif dan implementasi kebijakan akan terhambat. Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus cakap bekerja sama dengan baik guna memberikan dukungan kepada kebijakan yang sudah diterima secara demokratis.

Struktur birokrasi ialah variabel terakhir dalam teori eksekusi kebijakan Edward III. Salah satu organisasi yang bahkan sering menjalankan operasionalnya secara keseluruhan ialah birokrasi. Birokrasi bisa ditemukan di entitas swasta, sistem pemerintahan, dan lingkungan lainnya. Argumen ini menunjukkan bahwasannya melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah memerlukan pemahaman dasar tentang struktur birokrasi. Edward III menyatakan bahwasannya prosedur operasi standar (SOP) dan pembagian kerja ialah dua ciri utama birokrasi.

1.5.6 Pariwisata

1.5.6.1 Pengertian Pariwisata

Secara umum, pariwisata ialah perpindahan sementara seseorang dari satu lokasi ke lokasi lain dengan meninggalkan lokasi semula, baik dengan tujuan mencari penghidupan di tempat tujuan ataupun hanya untuk tujuan menikmati waktu senggang ataupun kegiatan rekreasi. untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

Pariwisata, dalam kata-kata Kodhyat (1998), ialah tindakan perpindahan sementara dari satu lokasi ke lokasi lain yang dilaksanakan

oleh individu ataupun kelompok dalam upaya menjalin keselarasan ataupun keseimbangan dengan lingkungan dari segi sosial, budaya, alam, dan ilmu pengetahuan. Menurut Gamal (2002), pariwisata ialah tindakan seseorang meninggalkan tempat tinggalnya untuk sementara waktu untuk mengunjungi lokasi lain. Kepergiannya dilatarbelakangi oleh sejumlah kepentingan, antara lain terkait ekonomi, kemasyarakatan, budaya, politik, agama, kesehatan, dan bidang lainnya. Selain hal tersebut, Burkart dan Medlik (1987) mengutarakan pariwisata sebagai perpindahan individu yang memiliki sifat sementara dan sementara ke lokasi selain tempat tinggal dan pekerjaan adatnya, serta aktivitas yang mereka lakukan selama berada di sana.

Organisasi Pariwisata Dunia (1999) mengutarakan pariwisata sebagai aktivitas manusia apa pun yang melibatkan perjalanan dan penginapan di lokasi di luar lingkungan khas seseorang. Sedangkan menurut Negara Republik Indonesia, pariwisata diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang yang mengunjungi suatu lokasi tertentu dengan tujuan untuk bersantai, mengembangkan diri, ataupun meneliti keunikan lokasi wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu dan jangka waktu yang singkat menurut Undang-undang Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang pariwisata.

1.5.6.2 Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata menurut Barret dan Giantari (2015:34) ialah upaya untuk menciptakan ataupun mengiklankan fasilitas pariwisata guna memaksimalkan daya tarik wisata dan menjadikannya lebih menarik bagi pengunjung dari segi lokasi dan khalayak sasaran. Munasef mengklaim dalam (Chaerunissa & Yuniningsih, 2020) bahwasannya upaya bersama dilaksanakan di seluruh bidang pengembangan pariwisata untuk menarik pengunjung dan menyediakan fasilitas, infrastruktur, serta produk dan layanan yang diperlukan untuk memenuhi permintaan mereka. Dengan mengingat hal ini, istilah "pengembangan" bisa dipahami sebagai prosedur, pendekatan, ataupun serangkaian tindakan yang dipakai untuk menciptakan produk baru ataupun memaksimalkan kualitas produk yang sudah ada.

Pembentukan kawasan pariwisata memerlukan perencanaan yang matang karena akibat ekonominya cukup besar. Jika langkah-langkah yang dilaksanakan dalam pengembangan wisata bisa memaksimalkan akibat positifnya sekaligus memitigasi akibat negatifnya, maka proses tersebut dianggap berhasil. Pembangunan yang tidak diinginkan di masa depan, seperti perencanaan tata ruang yang tidak tepat, kerusakan lingkungan, tumbuhnya sektor kegiatan yang tidak diinginkan, dan terciptanya berbagai kesulitan masyarakat, akan dipengaruhi oleh perencanaan yang tidak tepat (Fitrianto, 2019)

Menurut Page (2009), setidaknya ditemukan lima (lima) pendekatan tidak sama terhadap pertumbuhan pariwisata, antara lain:

1. *Boostern approach.*

Metode ini memiliki sifat lugas dan menggambarkan pariwisata sebagai manfaat bagi sebuah lokasi dan masyarakatnya. Namun upaya ini mengabaikan masukan masyarakat pada tahap perencanaan dan kurang memperhatikan daya dukung kawasan.

2. *The economic industry approach.*

Metode pengembangan wisata menjadikan kebahagiaan dan pengalaman pengunjung sebagai tujuan utama, mengutamakan tujuan ekonomi dibandingkan tujuan sosial dan lingkungan.

3. *The physical spatial approach.*

Metode pengembangan pariwisata ini memanfaatkan ide-ide pembangunan berbasis spasial dalam hubungannya dengan pemakaian lahan geografis. Misalnya, memecah kelompok wisatawan untuk mencegah perselisihan antar tamu.

4. *The community approach.*

Sebuah strategi pengembangan wisata yang menyajikan penekanan kuat pada pemaksimalan keterlibatan masyarakat dalam prosesnya.

5. *Sustainable approach.*

Pengembangan pariwisata dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan, potensi kepentingan sumber daya, dan akibat pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan.

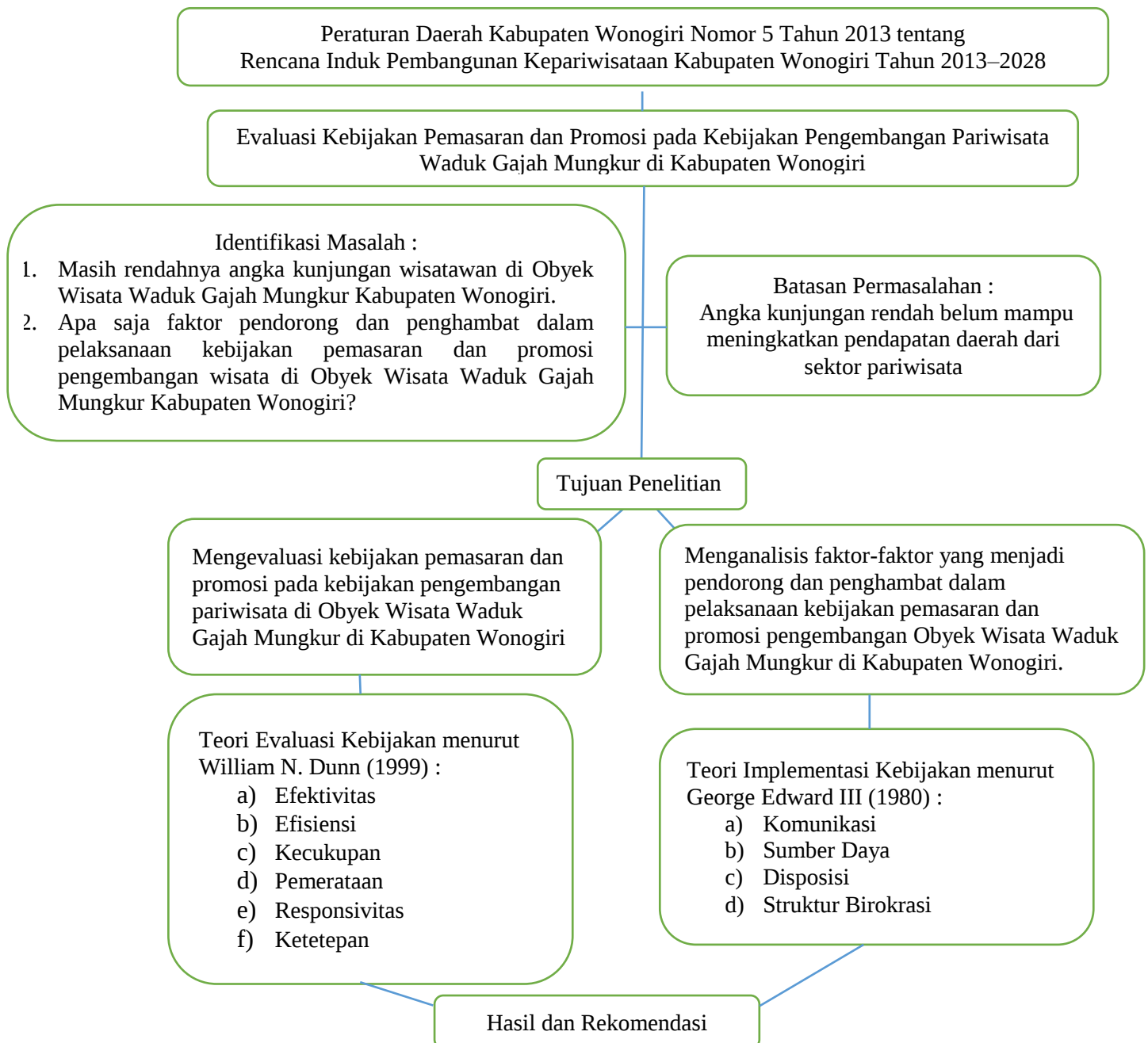
Tujuan pertumbuhan pariwisata nasional dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011, yang menghimbau supaya Indonesia menjadi negara tujuan wisata kelas dunia yang berdaya saing, berkelanjutan, dan cakap memberikan dorongan kepada pembangunan daerah dan mensejahterakan warganya. Untuk meraih hal tersebut, dilaksanakan empat (empat) strategi pengembangan pariwisata, yaitu: tujuan wisata yang aman, menyenangkan, memikat, dan mudah dijangkau; pemasaran pariwisata yang unggul, beretika, dan kooperatif; industri pariwisata yang kompetitif; dan pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan organisasi kemasyarakatan yang efektif memberikan dorongan kepada tercapainya pembangunan pariwisata berkelanjutan.

1.6 Kerangka Pikir Penelitian

Penetapan lokasi dan interaksi antar variabel diperlukan untuk menyajikan arah yang jelas atas dasar pemikiran di balik penelitian ini. Kerangka ini dikembangkan dengan memakai prinsip-prinsip ilmiah dan teori-teori penelitian yang mendasar, dibuktikan dengan tinjauan pustaka ataupun ringkasan ulasan yang ditulis, dan dihubungkan dengan garis-garis berdasarkan variabel yang diteliti oleh peneliti. Proses teoritis berhubungan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh peneliti dengan menjelaskan masalah teori yang relevan, serta menyusun kerangka konsep ataupun

kerangka pemikiran yang dipakai dalam penelitian. Topik yang akan dibahas ialah evaluasi kebijakan pemasaran dan promosi pengembangan pariwisata Obyek Wisata Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri. Kerangka pikir penelitian pada tesis ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. 2
Kerangka Pikir Penelitian



1.7 Operasionalisasi Konsep

1. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan pemasaran dan promosi pengembangan pariwisata

Obyek Wisata Waduk Gajah Mungkur akan dilihat dari :

a. Efektivitas

Efektivitas adalah tercapainya tujuan yang diinginkan dari suatu kebijakan dalam hal ini dilihat meningkatnya jumlah pengunjung wisata Obyek Wisata Gajah Mungkur.

b. Efisiensi

Efisiensi adalah penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin untuk mencapai tujuan yang maksimal.

c. Kecukupan

Kecukupan adalah kemampuan kebijakan mampu memecah masalah yaitu masih rendahnya jumlah pengunjung wisatawan.

d. Perataan

Kemanfaatan yang merata bagi *stakeholder* yang terlibat.

e. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat (wisatawan).

f. Ketetapan

Ketepatan adalah kesesuaian antara tujuan kebijakan dan capaian.

2. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan kebijakan pemasaran dan promosi pengembangan pariwisata Obyek Wisata Waduk Gajah Mungkur dilihat dari gejala sebagai berikut :

a. Komunikasi

Komunikasi akan dilihat dari transmisi, kejelasan, konsistensi kebijakan.

b. Sumber Daya

Sumber daya akan dilihat dari sumber daya manusia, informasi, wewenang, fasilitas pendukung pelaksanaan kebijakan.

c. Disposisi

Disposisi dalam penelitian ini akan dilihat dari sikap, dedikasi, dan integritas dalam melaksanakan kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dilihat dari kemampuan pelaksana kebijakan untuk mendukung pencapaian tujuan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2009), teknik kualitatif ialah sebuah proses melaksanakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari kata-kata tertulis ataupun lisan orang serta perilaku yang mereka amati, sedangkan Nawawi (1991) mengartikan teknik deskriptif sebagai sebuah proses penyelesaian masalah penelitian

dengan upaya mengkarakterisasi ataupun menggambarkan keadaan terkini dari topik ataupun objek penelitian (individu, lembaga masyarakat, dan sebagainya) berdasarkan fakta yang nyata ataupun sebagai mereka sebenarnya. Penelitian deskriptif kualitatif diartikan sebagai penelitian yang memakai penjelasan yang sistematis, faktual, akurat, dan tidak ambigu tentang sebuah fenomena yang menarik dan mungkin terkait dengan interaksi yang terjadi antara satu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Tersedianya jenis data tambahan seperti makalah ataupun laporan yang berkaitan dengan frasa, kata, ataupun angka yang bisa dinyatakan dalam bentuk angka, memberikan dukungan kepada gambaran gambar yang tercipta dari data deskriptif tersebut di atas.

Peneliti memakai penelitian deskriptif kualitatif karena objek penelitiannya ialah kegiatan ataupun proses yang melibatkan banyak orang, khususnya pengkajian evaluasi kebijakan pemasaran dan promosi pengembangan pariwisata Obyek Wisata Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri. Lewat analisis menyeluruh terhadap kasus ini, para akademisi akan bisa mengapresiasi signifikansinya terhadap tujuan komunitas, organisasi, dan masyarakat tertentu secara keseluruhan. Memperoleh wawasan dari kejadian ini bisa membantu organisasi dan kelompok lain mengatasi tantangan yang mereka hadapi.

1.8.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka penelitian ini akan difokuskan untuk menganalisis pelaksanaan evaluasi kebijakan pemasaran dan promosi pengembangan pariwisata Objek Wisata Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri.

1.8.3 Fenomena Penelitian

Fenomena dalam penelitian ini berfokus tentang Evaluasi Kebijakan Pemasaran dan Promosi Pengembangan Pariwisata Objek Wisata Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri. Menurut William N. Dunn (1999), yang dimaksud dengan kriteria adalah: efektivitas, efisiensi, pemerataan, responsivitas dan kecukupan. Adapun untuk melihat faktor pendorong dan penghambat dengan menggunakan teori George C. Edward III—yang berpendapat bahwasannya kriteria seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi berdampak pada implementasi kebijakan—selanjutnya. Tabel di bawah ini menunjukkan fenomena penelitian.

Tabel 1. 7 Fenomena Penelitian

No.	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala
1	Evaluasi Kebijakan Pemasaran dan Promosi Pengembangan Pariwisata	Efektivitas	Meningkatnya angka kunjungan wisatawan
		Efisiensi	a. Sumber Daya yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan b. Penggunaan Sumber Dana c. Sarana dan prasarana yang digunakan mendukung pelaksanaan kebijakan
		Kecukupan	Kebijakan dapat mendukung mendongkrak angka kunjungan wisatawan
		Pemerataan	a. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan b. Nilai manfaat bagi <i>stakeholder</i>
		Responsivitas	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat (wisatawan) berkaitan dengan kebijakan pemasaran dan promosi (kemudahan akses destinasi wisata)
		Ketepatan	Meningkatnya jumlah kunjungan sesuai dengan yang ditargetkan
2	Faktor Pendorong dan Faktor	Komunikasi	a. Transmisi pelaksanaan kebijakan b. Kejelasan informasi dan tupoksi

	Penghambat Kebijakan		c. Konsistensi pelaksanaan kebijakan
		Sumber Daya	a. Sumber Daya Manusia (<i>staf</i>) b. Informasi yang transparan c. Wewenang yang rinci d. Fasilitas yang memadai
		Disposisi	a. Sikap pelaksana b. Dedikasi pelaksana c. Integritas pelaksana
		Struktur birokrasi	a. Dukungan regulasi kebijakan b. Kompetensi pelaksana melaksanakan kebijakan c. Dukungan sistem dalam pelaksanaan kebijakan

Sumber : Di Olah Peneliti (2024)

1.8.4 Jenis Dan Sumber Data

Penelitian berikut memakai desain penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif (Sugiyono, 2011) mencirikan keadaan permasalahan yang diselidiki ataupun menciriknya berdasarkan keadaan dan latar khusus di mana penelitian itu dilakukan. Sugiyono (2011) mengutarakan penelitian kualitatif sebagai sebuah pendekatan di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dan meneliti item-item dalam kondisi alamiahnya.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder untuk memperoleh data dan informasi yang berkualitas tinggi.

1.8.4.1 Data Primer

Data primer ialah informasi yang dikumpulkan langsung dari sebuah sumber, biasanya lewat penelusuran, wawancara, dan metode lainnya. (Arikunto, 2013). Dalam penelitian berikut wawancara dan observasi

ialah sumber data primer. Informasi penting yang diperlukan untuk penelitian berikut ialah :

1. Sejarah singkat Kabupaten Wonogiri
2. Letak geografis Kabupaten Wonogiri
3. Kebijakan Pemasaran dan Promosi Pengembangan Pariwisata oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri
4. Stastistik Wisatawan dan Pendapatan Objek Wisata Waduk Gajah Mungkur

1.8.4.2 Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber yang dihasilkan dengan menganalisis, menelaah, dan memahami data dengan memakai sebuah teknik menurut Sugiyono (2011). Buku, jurnal, internet, dan penelitian lain tentang Evaluasi Kebijakan Pemasaran dan Promosi pada Pengembangan Pariwisata di Daya Tarik Wisata Waduk Gajah Mungkur Kabupaten Wonogiri menjadi sumber data sekunder penelitian berikut.

1.8.4.3 Pemilihan Informan

Informan penelitian yang memahami pengetahuan tentang objek penelitian dikenal sebagai informan dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2011). Strategi sampel penelitian berikut menggabungkan *purposive sampling* dengan *non-probability sampling*. *Non-probability sampling* menurut Sugiyono (2018:136) ialah sebuah metode pengambilan sampel yang tidak menyajikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasi untuk dipilih

menjadi sampel. Adapun pendekatan *purposive sampling* menurut Sugiyono (2018:138) ialah pemilihan jumlah sampel yang akan diteliti dengan upaya pengambilan sampel berdasarkan faktor-faktor tertentu sesuai dengan kriteria yang ditujukan.

Pengertian tersebut berarti bahwasannya teknik *purposive sampling* bisa dipahami dengan melibatkan pemakaian informan yang bersedia menyajikan informasi data dan dipilih berdasarkan kriteria yang sesuai ataupun karakteristik unik dan memiliki kompetensi di bidangnya yang relevan untuk keperluan penelitian. Sesuai dengan pedoman ini, peneliti memilih dan mengkualifikasi informan untuk memastikan bahwasannya data yang dikumpulkan bermanfaat bagi penelitian yang dilaksanakan:

1. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Dispora) Kabupaten Wonogiri dan UPTD Pengelola Objek Wisata Waduk Gajah Mungkur Kabupaten Wonogiri. Bertanggung jawab dalam pengelolaan Objek Wisata Waduk Gajah Mungkur.
2. Tokoh Masyarakat. Pemerintah memerlukan ide dan peran serta dari masukan tokoh masyarakat dalam pembangunan. Tokoh masyarakat memiliki pengaruh besar dalam interaksi sosial sehingga memunculkan kontrol sosial yang bisa menggiring legitimasi untuk menyajikan peranan dalam pembangunan berkelanjutan.

3. Pengunjung. Pemerintah memerlukan ide dan peran serta dari masukan pengunjung dalam pembangunan berkelanjutan tujuan wisata.

Tabel 1.8
Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah	Keterangan
1.	Aparat Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri	2 Orang	- Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri. - Kepala Bidang Pariwisata
2.	Tim Teknis Pengelola Objek Wisata Waduk Gajah Mungkur	1 Orang	Ketua Pengelola Objek Wisata Waduk Gajah Mungkur
3.	Tokoh Masyarakat Sekitar Objek Wisata	2 Orang	Badan/instansi/kantor/pelaku usaha yang berada di sekitar Objek Wisata Waduk Gajah Mungkur
4.	Pengunjung Objek Wisata Waduk Gajah Mungkur	3 Orang	Wisatawan Nusantara/Mancanegara

Sumber : Di Olah Peneliti (2024)

1.8.5 Instrumen Penelitian

Sugiyono (2016) menegaskan bahwasannya peneliti ialah instrumen ataupun alat penelitian utama dalam penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif antara lain mengidentifikasi tujuan penelitian, memilih orang sebagai sumber data, mengumpulkan data, melakukan evaluasi kualitas data, menganalisis data, menafsirkan hasil, dan merumuskan kesimpulan. Peneliti

akan melaksanakan pengumpulan data, analisis, dan pengambilan kesimpulan sendiri di lapangan.

Peneliti memakai pedoman wawancara penelitian untuk melaksanakan wawancara guna mengumpulkan data. Melengkapi kumpulan data dan membandingkan data yang dikumpulkan dari lapangan ialah komponen penting dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat bantu penelitian, seperti:

1. Penelitian sendiri: Peneliti berperan secara langsung dalam proses penelitian mulai dari mendekati dengan topik, mengumpulkan data menganalisis hingga menginterpretasikannya tanpa diwakili oleh pihak lain sehingga dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti mampu mengemukakan data yang akurat dan terpercaya.

Melalui penelitian sendiri, data yang akan dikumpulkan berupa gambaran umum lokasi penelitian, serta berbagai informasi terkait objek penelitian yang digali melalui kegiatan observasi maupun kegiatan wawancara

2. Pedoman wawancara : Diperlukan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian dan memudahkan peneliti dalam menyikapi setiap rumusan masalah yang akan dibahas.

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian dan memudahkan peneliti dalam menyikapi setiap rumusan masalah yang akan dibahas, diperlukan sebuah pedoman wawancara. Pada proses wawancara akan dikumpulkan data berupa kerangka informasi dari informan/subyek penelitian dengan menggali lebih jauh dengan pertanyaan lanjutan untuk memperoleh masukan dan rekomendasi dari penelitian.

3. Telepon Genggam (HP): Alat ini dipakai dalam penelitian untuk memperlancar kelancaran penelitian, yakni sebagai alat perekam suara ataupun gambar. Wawancara dengan narasumber menyajikan data audio yang sudah dikumpulkan. Informasi yang dikumpulkan berbentuk gambar, yakni sebagai dokumentasi observasi lapangan.
4. Laptop dipakai untuk mengatur dan memelihara seluruh data wawancara serta analisis literatur relevan yang dipakai untuk menghasilkan temuan penelitian. Soft file Kebijakan Pengembangan Wisata Kabupaten Wonogiri, data Profil Kabupaten Wonogiri, data wisata Kabupaten Wonogiri, data kelembagaan pariwisata, dan data terkait lainnya yang diperlukan ialah data yang dikumpulkan.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Creswell (2014:266), pendekatan pengumpulan data mencakup upaya untuk membatasi penelitian, pengumpulan data lewat observasi dan wawancara yang terorganisir ataupun tidak terstruktur, dokumentasi, materi

visual, dan aturan pembuatan bisnis untuk mencatat dan mencatat informasi. Kualitas ialah yang berikutnya.

Karena tujuan penelitian, pengumpulan data ialah tahap yang paling penting secara strategis dan dipengaruhi oleh strategi pengumpulan data yang digunakan.

Mendapatkan informasi yang komprehensif pada judul penelitian Evaluasi Kebijakan Pemasaran dan Promosi pada Pengembangan Pariwisata Obyek Wisata Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri menjadi tujuan utama penelitian berikut. Untuk mengumpulkan fakta dan informasi yang diperlukan, peneliti memakai metode:

1. Observasi

Birokrasi pemerintahan daerah Kabupaten Wonogiri dicermati. Selain hal tersebut observasi juga dilaksanakan di Obyek Wisata Waduk Gajah Mungkur dan Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri. Pengamatan khusus tentang keadaan sosial ekonomi masyarakat diarahkan pada masyarakat sekitar tujuan wisata.

2. Wawancara

Wawancara terhadap narasumber yang bisa menyajikan informasi sesuai keperluan dilaksanakan guna mendapatkan data dan informasi yang komprehensif. Individu sumber wawancara dipilih tergantung pada tingkat keahlian mereka.

3. Dokumentasi

Catatan peristiwa sejarah disebut dokumen. Rekaman bisa berupa karya seni tertulis, foto, ataupun kreasi berskala besar yang dibuat oleh seseorang. Catatan tertulis seperti buku harian, biografi, sejarah hidup, dan aturan kebijakan. dokumen yang memiliki sifat visual, seperti gambar, ilustrasi, sketsa kehidupan, dan lainnya (Sugiyono, 2017:127). Dokumentasi peneliti bersumber dari makalah ataupun catatan terkait dengan permasalahan penelitian, termasuk peraturan perundang-undangan dan kerangka hukum yang mengatur pelayanan kesehatan. Selain informasi tentang tujuan serta sasaran organisasi, personel, dan struktur.

1.8.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dilaksanakan baik pada awal ataupun selama proses penelitian dalam penelitian kualitatif. Data akhir dikumpulkan dari beberapa sumber yang relevan dan relevan (penting), setelah itu dianalisis secara metode. wawancara, observasi, editing, kategorisasi, reduksi, display data, dan penambahan data ialah sumber data yang diteliti. Metode analisis data penelitian berikut memakai model analisis interaktif yang dibuat oleh Miles dan Huberman.

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016), tugas analisis data kualitatif diselesaikan secara berulang-ulang dan terus-menerus sampai datanya jenuh. Kegiatan data kualitatif, yaitu:

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Setiap proyek studi berkisar pada kegiatan pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, informasi dikumpulkan lewat dokumentasi, wawancara, dan observasi, ataupun lewat gabungan metode-metode tersebut (Sugiyono, 2020). Peneliti melaksanakan penyelidikan luas terhadap konteks sosial ataupun subjek yang diteliti pada tahap pertama, mendengarkan, melihat, dan mencatat segala sesuatunya secara utuh. Peneliti akan mendapatkan banyak informasi dan berbagai macam varian dalam metode ini.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data harus segera dilaksanakan untuk memulai analisis data, karena semakin lama waktu penelitian maka data tersebut akan semakin kompleks dan rumit. Sugiyono (2020) mengartikan reduksi data sebagai proses pemadatan informasi, pemilihan aspek-aspek kunci, pemfokusan pada hal-hal yang vital, kemudian mencari tema dan pola. Hasilnya, data yang sudah meraih level tersebut akan menyajikan gambaran yang lebih kaya dan memudahkan peneliti mengumpulkan data selanjutnya sesuai kebutuhan.

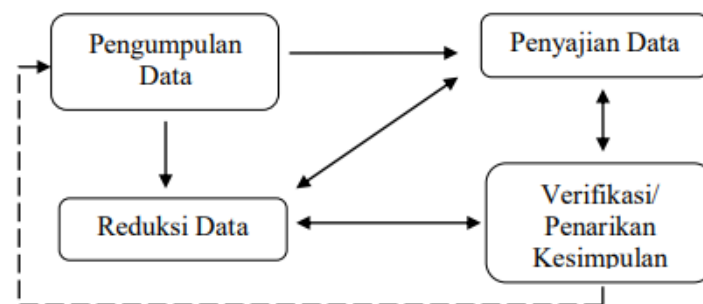
3. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah fase reduksi muncul tampilan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti diagram alir, infografis, korelasi kategori, dan penjelasan singkat (Sugiyono, 2016). Langkah ini akan memudahkan untuk memahami

apa yang sedang terjadi dan mengatur pekerjaan berikut berdasarkan apa yang sudah dipelajari.

4. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Miles dan Huberman mengutarakan verifikasi ataupun pengambilan keputusan sebagai bagian terakhir dari proses analisis data kualitatif. Temuan awal yang dilaporkan ialah temuan awal dan bisa dimodifikasi jika pengumpulan data lebih banyak menghasilkan lebih sedikit bukti untuk memberikan dukungan kepada kesimpulan awal. Namun, jika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data lebih lanjut, dan temuan awal dikonfirmasi oleh bukti yang andal dan konsisten, kesimpulannya mungkin dianggap kredibel (Sugiyono, 2016).



Gambar 1. 3 Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman

Sumber : Sugiyono (2005)

Sebelum presentasi, hilangkan hal-hal penting dari pengumpulan data, sintesis dan penyusunan, konsentrasi pada informasi penting, dan tujuan studi. Sepanjang penelitian, reduksi data dilaksanakan secara konstan. Data ditampilkan setelah disederhanakan sehingga Anda bisa melihat gambaran

besar ataupun berbagai komponen yang relevan dan penting. Selanjutnya data tersebut diringkas dan disusun menjadi sebuah makalah untuk mengkaji temuan akhir penelitian, yang mungkin bisa menjawab rumusan masalah secara keseluruhan.

Dari alur yang dijelaskan di atas, terlihat bahwasannya pengumpulan data analisis data sudah dimulai dan kemudian data disajikan secara kompak. Ketiga proses ini saling terkait dan bisa diklarifikasi untuk memverifikasi validitas data dan kekokohan data yang mengidentifikasi dan menjawab masalah yang dirumuskan secara kualitatif.

Untuk mengambil kesimpulan tentang implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Wonogiri, peneliti dalam penelitian berikut memakai metode analisis data interaktif, yakni data dikumpulkan, disaring, dikategorikan, diarahkan, dan dihilangkan informasi-informasi yang tidak perlu. Data kasar disusun dari lapangan dan diberi keterangan deskriptif ataupun disajikan dengan memakai tabel, grafik, dan alat bantu visual lainnya.

1.8.8 Keabsahan Data

Salah satu metode kunci untuk menilai reliabilitas dan validitas data yang dipakai dalam penelitian berikut ialah validitas data. Teknik ialah pendekatan validitas data yang dipakai dalam penelitian berikut. Triangulasi ialah teknik yang dipakai untuk memverifikasi keakuratan data dengan membandingkannya dengan data lain ataupun menggunakannya sebagai sumber informasi independen. Penelitian berikut memakai pendekatan triangulasi karena mendalam

Sumber data penelitian berikut berasal dari dokumen dan wawancara. Triangulasi ialah teknik pengumpulan data yang didefinisikan oleh Sugiyono (2011) sebagai perpaduan antara sumber data terkini dan pendekatan pengumpulan data.

Sugiyono menyebutkan tiga macam triangulasi, diantaranya:

1. Triangulasi Sumber

Untuk memverifikasi kebenaran data, seseorang bisa memverifikasinya dengan melaksanakan referensi silang data dari berbagai sumber. Misalnya, untuk memverifikasi kebenaran data yang berkaitan dengan strategi pemerintah, staf kantor terkait, masyarakat, dan pimpinan bisa dilibatkan dalam proses pengumpulan dan pengujian data. Daripada dirata-ratakan, seperti dalam penelitian kualitatif, data dari ketiga sumber ini bisa dikarakterisasi, diklasifikasi, dan dipakai untuk menyoroti persamaan, perbedaan, dan informasi unik di ketiga sumber data tersebut. Setelah peneliti melakukan evaluasi data untuk menarik kesimpulan, mereka meminta persetujuan ketiga sumber data (*member check*).

2. Triangulasi Teknik

Metodologi triangulasi membantu untuk mengetahui kebenaran ataupun keaslian data dengan upaya membandingkannya dengan sumber yang sama menggunakan beberapa cara. Misalnya informasi dikumpulkan melalui

wawancara, dikonfirmasi melalui dokumentasi dan observasi, dan sebagainya. Peneliti melaksanakan pembicaraan dan menyelidiki lebih jauh sumber data dan informasi yang dipermasalahkan, serta sumber-sumber lainnya, untuk menentukan apakah data tersebut dianggap benar ataupun mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda. Misalnya, jika data tidak sama ditemukan menggunakan berbagai pendekatan kredibilitas.

3. Triangulasi Waktu

Waktu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keandalan data. Apabila data diperoleh melalui teknik wawancara di pagi hari, ketika informan masih penuh perhatian dan tidak terlalu kesulitan ataupun melaksanakan pekerjaan rumah, mereka bisa menyajikan informasi yang lebih bisa dipercaya dan autentik. Untuk memeriksa keakuratan data, ujian bisa dilakukan beberapa kali ataupun dalam situasi tidak sama dengan menggunakan wawancara, observasi, ataupun metode lainnya. Prosedur ini diulangi hingga ditentukan apakah hasil pengujian menghasilkan data yang tidak konsisten.